

RENCANA STRATEGIS

**KECAMATAN MOJOAGUNG
2025 - 2029**

SEPTEMBER 2025



**PEMERINTAH KABUPATEN
JOMBANG**

Jl. Raya Sumobito No. 24A Mojoagung
Telp. (0321) 495002 JOMBANG

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	9
1.3 Maksud dan Tujuan	12
1.4 Sistematika Penulisan	13
BAB II	15
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	15
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	15
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan.....	17
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	27
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	33
2.1.4 Kelompok sasaran layanan	134
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	146
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	146
2.2.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.	148
2.2.3 Isu Strategis.....	156
BAB III	158
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	158
3.1 Tujuan Renstra PD Tahun 2025-2029	158

3.2 Sasaran Renstra PD tahun 2025-2029.....	160
3.3 Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029	163
3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.	166
BAB IV	172
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN	172
BAB V	205
PENUTUP	205

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufiq, hidayah dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Mojoagung Renstra Kecamatan Mojoagung Tahun 2025 - 2029 dapat diselesaikan.

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Mojoagung (Renstra Kecamatan Mojoagung) merupakan acuan perencanaan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2025 – 2029 guna pencapaian target dan sasaran pembangunan daerah.

Mekanisme dan tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Mojoagung sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan selama periode 5 (lima) tahun, sesuai dengan visi, misi, dan arah kebijakan pemerintah daerah.

Renstra Kecamatan ini disusun sebagai pedoman dan acuan kerja seluruh jajaran aparatur di lingkungan Kecamatan Mojoagung

dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sekaligus menjadi alat pengendali dan evaluasi kinerja secara periodik. Penyusunan dokumen ini juga melibatkan partisipasi berbagai pihak, baik dari unsur pemerintah daerah, masyarakat, maupun pemangku kepentingan lainnya, sehingga diharapkan dapat mewujudkan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga dokumen Rencana Strategis Kecamatan Mojoagung Tahun 2025–2029 ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan publik dan pembangunan di wilayah Kecamatan Mojoagung.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Mojoagung, 19 September 2025



CAMAT MOJOAGUNG

ANJIK EKO SAPUTRO, SH., M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19700727 199203 1 00

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Strategis (Renstra Perangkat Daerah) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra Perangkat Daerah disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing - masing Perangkat Daerah.

Memasuki periode perencanaan 2025–2029, penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan perangkat daerah untuk jangka waktu lima tahun sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 sekaligus menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan. Renstra ini menjadi dokumen perencanaan strategis yang memuat penjabaran arah kebijakan pembangunan daerah ke dalam program dan kegiatan konkret yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah, dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis, baik dari aspek internal maupun eksternal.

Penyusunan Renstra Kecamatan Mojoagung Tahun 2025–2029 ini dilatarbelakangi oleh dinamika kebutuhan pembangunan wilayah, perkembangan peraturan perundang-undangan, serta tuntutan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik. Dalam

konteks otonomi daerah, kecamatan sebagai bagian dari perangkat daerah kabupaten memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa, dan pembinaan administrasi pemerintahan di wilayah kerjanya.

Penyusunan Renstra ini juga merupakan tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, dimana diamanatkan bahwa:

- Diktum Kedua huruf b: Bupati/Walikota memerintahkan seluruh kepala perangkat daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025–2029 secara simultan dan terkoordinasi dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota;
- Diktum Ketiga huruf c: Gubernur/Bupati/Walikota menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota;
- Diktum Keenam huruf b: Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

Dengan berpedoman pada ketentuan tersebut, penyusunan Renstra Kecamatan Mojoagung Tahun 2025–2029 diarahkan untuk selaras dengan dokumen perencanaan yang lebih tinggi, mulai dari Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) di tingkat nasional, Renstra Pemerintah Provinsi Jawa Timur, RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2025–2029, hingga Renja Kecamatan

Mojoagung sebagai penjabaran tahunan. Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra Perangkat Daerah memuat tentang visi misi Kepala Daerah, tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsinya.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja dinas/badan/kantor dan perangkat - perangkat daerah lainnya. Perencanaan strategis pemerintah juga merupakan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, lokal, nasional dan global namun tetap berada pada tatanan sistem manajemen nasional.

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Mojoagung yang disusun berfungsi sebagai landasan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Mojoagung selama lima tahun ke depan, dan sebagai acuan untuk mencapai tujuan Kecamatan Mojoagung yang mendukung pencapaian Tujuan Pemerintah Kabupaten Jombang.

Tahapan proses penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Mojoagung .

Tahap ini dilakukan dengan:

1. Rapat Koordinasi dalam pembahasan Renstra bersama seluruh pegawai pemerintah Kecamatan Mojoagung dalam

Rapat Dinas dan Rapat Koordinasi terbatas para pejabat struktural Kecamatan Mojoagung.

2. Melaksanakan orientasi mengenai renstra untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman dalam penyusunan Renstra Kecamatan Mojoagung , menyusun tata kala sebagai panduan kerja, dan
3. mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Renstra.

Penyusunan rancangan awal Rencana Strategis Kecamatan Mojoagung. Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap gambaran pelayanan, analisis permasalahan, analisis isu strategis, dan perumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja.

3. Penyusunan rancangan Rencana Strategis Kecamatan Mojoagung.

Rancangan Renstra adalah rancangan awal Renstra Kecamatan Mojoagung yang dilakukan berdasarkan Surat Edaran Bupati Jombang Nomor : 000.7.2/100/415.01/2025 tanggal 13 Februari 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2029.

4. Penyusunan rancangan akhir Rencana Strategis Kecamatan Mojoagung. Tahap ini merupakan penyempurnaan rancangan Renstra Kecamatan Mojoagung menjadi rancangan akhir Renstra Kecamatan Mojoagung dengan berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Rancangan akhir Renstra Kecamatan Mojoagung disusun dengan sistematika:

- I. Pendahuluan;
 - II. Gambaran pelayanan, Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
 - III. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan;
 - IV. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
 - V. Penutup.
5. Rancangan akhir Renstra Kecamatan Mojoagung disampaikan kepada

Bappeda untuk diverifikasi. Renstra yang telah diverifikasi tersebut kemudian disampaikan kepada Bupati Jombang melalui Kecamatan Mojoagung untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang No. 25 Tahun 2004, Bappeda menyiapkan Rancangan Awal RPJMD sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum, Program Prioritas Kepala Daerah, dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah. Selanjutnya Rancangan Awal RPJMD yang telah disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tersebut akan disampaikan kepada semua perangkat daerah untuk digunakan sebagai rujukan penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Hubungan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah adalah bahwa RPJMD menjadi rujukan atau pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan bersifat indikatif. Dikatakan bersifat indikatif adalah karena data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku. Renstra Perangkat Daerah disusun dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan

dalam RPJMD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Pengembangan Kecamatan Mojoagung dalam periode perencanaan 2025–2029 diarahkan untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah yang terintegrasi dengan kebijakan dan sasaran pembangunan nasional. Hal ini sejalan dengan prinsip sinkronisasi perencanaan antara pusat dan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Sebagai bagian dari komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan nasional, arah kebijakan pembangunan Kecamatan Mojoagung diselaraskan dengan Asta Cita yang memuat delapan prioritas pembangunan nasional, yaitu Asta Cita ke 4 “Mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya“ dalam hal ini bisa diimplementasikan dalam Reformasi birokrasi, penerapan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, berbasis kinerja dan pelayanan prima kepada masyarakat. Hal tersebut merupakan sebuah pilihan yang telah menjadi komitmen bersama, sehingga dalam pencapaiannya harus dilakukan secara bersama–sama antara berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) yaitu Camat dengan kelompok-kelompok masyarakat baik yang bergerak di bidang sosial budaya, ekonomi, maupun politik dan keamanan. Untuk mencapai harapan dimaksud, proses pembangunan daerah harus dilaksanakan secara sistematis mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasinya sampai dengan tahap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya.

Berangkat dari pemikiran di atas, perencanaan pembangunan baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan

dan sasaran dimaksud. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula.

Penyusunan Renstra 2025-2029 yang kedua didasari atas adanya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Penyusunan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja dan keuangan di lingkungan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana maka Pemerintah Kecamatan Mojoagung mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Mojoagung dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian tujuan dan arah kebijakan Kabupaten Jombang sebagaimana diharapkan semua pihak. Untuk merealisasikan strategi pencapaian arah kebijakan pembangunan daerah tadi, secara fungsional Kecamatan Mojoagung dituntut untuk mampu menterjemahkannya kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) yang berlaku selama 5 tahun (2025 s/d 2029) maupun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) yang berlaku satu tahunan.

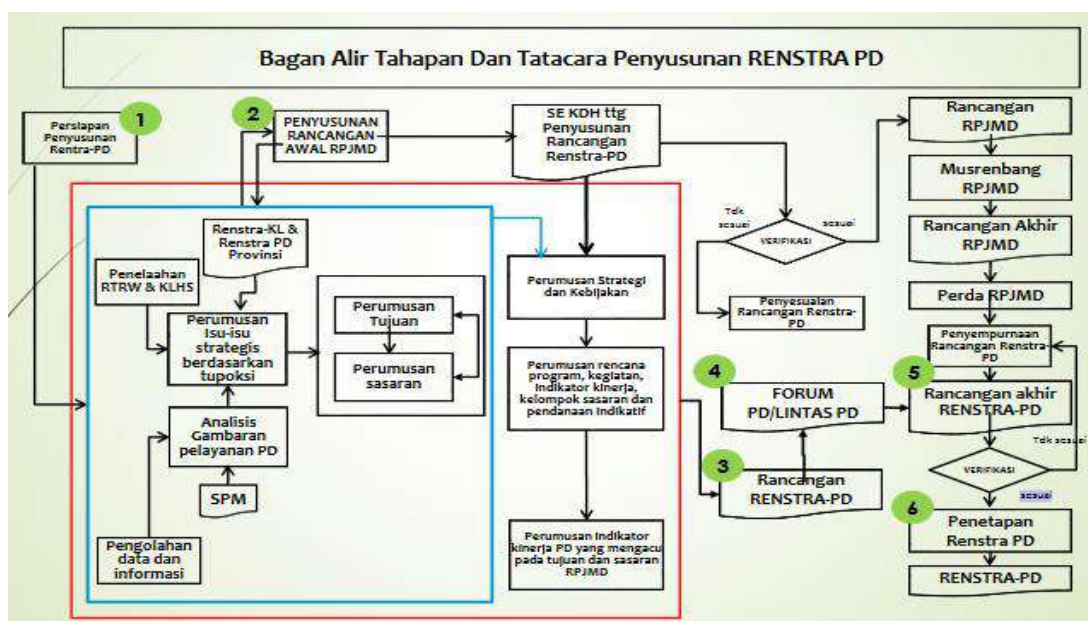
Renstra-SKPD atau Rencana Strategis - Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana resmi daerah yang berfungsi mengarahkan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan yang

memuat visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sebagai dokumen rencana yang sangat penting, sudah sepantasnya jika Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat memberikan perhatian pada kualitas proses penyusunan Renstra-SKPD, yang diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review secara berkala atas pelaksanaannya.

Dalam membuat Renstra memiliki beberapa dokumen yang diperlukan, dimana antara dokumen yang satu dengan dokumen yang lain saling memiliki keterkaitan. Hubungan dokumen yang satu dengan dokumen lainnya, dimana antara dokumen yang satu dengan dokumen lainnya saling berkaitan. Baik dari Dokumen yang bersifat Nasional, maupun dokumen yang berada ditataran daerah. Hal utama yang harus diperhatikan untuk menyusun Renstra kecamatan adalah RPJMD kabupaten jombang untuk memudahkan menuangkan dalam semua kepala bidang/seksi, maka diturunkanlah melalui Renstra Kecamatan Mojoagung.

Adapun Tata Cara Penyusunan Renstra PD Menurut Permendagri 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Gambar 1.1



1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Keputusan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Keputusan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Keputusan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Keputusan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Keputusan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
14. Keputusan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Timur;
15. Keputusan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 2/D);
21. Peraturan Daerah No 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 11/D) ;

22. Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang No. 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 59/D, Tambahan Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 59/D);
23. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jombang Tahun 2021 – 2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 10/E) ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025-2045.
25. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2025 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025 Nomor 4/E);
26. Surat Edaran Bupati Jombang Nomor 000.7.2/100/415.01/2025 tanggal 13 Februari 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2029

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud sebagai penjabaran secara operasional tahun 2025-2029 yang digambarkan dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan terkait urusan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan serta penataan ruang yang harus dilaksanakan oleh Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang selama kurun waktu 2025 - 2029.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Mojoagung Tahun 2025 - 2029 adalah :

1. Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Jombang dengan Kecamatan Mojoagung, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Kecamatan Mojoagung. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Mojoagung untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Kecamatan Mojoagung;
2. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Kecamatan Mojoagung dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang yang merupakan susunan garis besar isi dokumen Renstra adalah sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan, yang menguraikan :

- 1.1 Latar belakang.
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan.
- 1.3 Maksud dan tujuan;
- 1.4 Sistematika Penulisan.

Bab II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH:

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah (paling sedikit memuat
 - 2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Mojoagung

- 2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Mojoagung
- 2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Mojoagung
- 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan
- 2.2 Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Kecamatan Mojoagung
 - 2.2.1 Permasalahan Pelayanan PD
 - 2.2.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
 - 2.2.3 Telaahan Rencana tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
 - 2.2.4 Isu Strategis

Bab III. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Sasaran

- 3.1 Tujuan Renstra PD Tahun 2025-2029
 - 3.2 Sasaran Renstra PD tahun 2025-2029
 - 3.3 Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029
 - 3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029
- ### Bab V. Strategi dan Arah Kebijakan

Bab IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab V. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Pada Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas pokok dan fungsi) kecamatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki kecamatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra kecamatan periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas kecamatan yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra kecamatan ini.

Kecamatan Mojoagung merupakan salah satu kecamatan di wilayah Kabupaten Jombang yang memiliki posisi strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pembangunan daerah. Sebagai perangkat daerah di tingkat kecamatan, Kecamatan Mojoagung melaksanakan sebagian kewenangan Bupati dalam urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, pembinaan administrasi pemerintahan desa, serta koordinasi antar perangkat daerah di wilayah kerjanya. Kecamatan Mojoagung merupakan kecamatan dengan luas wilayah 4.850,204 Ha. Secara geografis Kecamatan Mojoagung berbatasan dengan:

Tabel 2.1

Batas Wilayah Kecamatan Mojoagung

Batas sebelah	Berbatasan dengan
Utara	Kecamatan Sumobito
Timur	Kec. Trowulan, Mojokerto
Selatan	Kec. Mojowarno
Barat	Kec. Peterongan

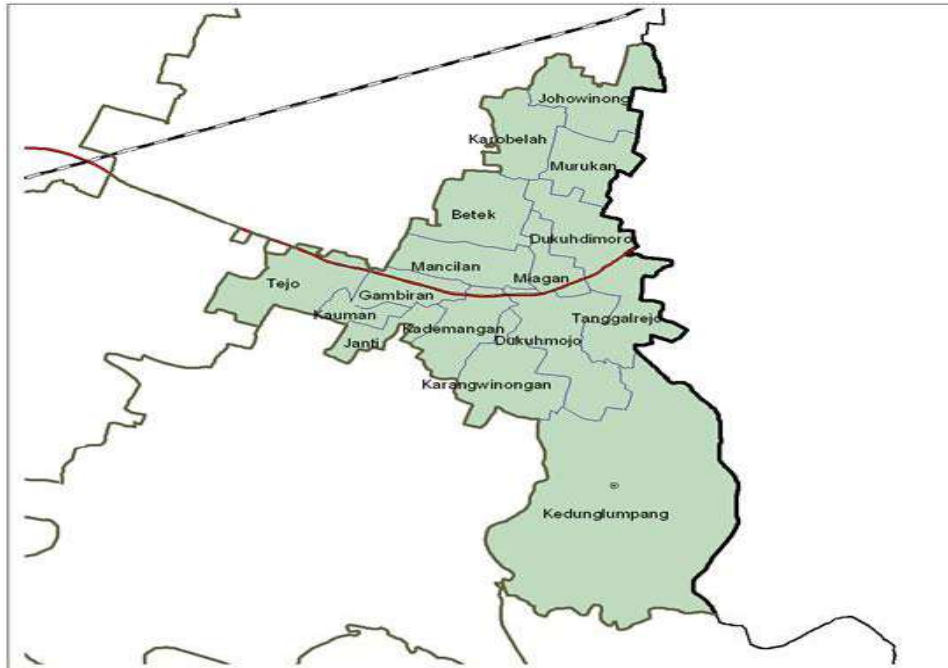
Kecamatan Mojoagung merupakan wilayah kecamatan yang memiliki 18 (delapan belas) desa dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.2

Nama-nama Desa di Kecamatan Mojoagung

No.	Nama Desa	No.	Nama Desa
1.	Miagan	10.	Karangwinongan
2.	Mojotrisno	11.	Betek
3.	Mancilan	12.	Janti
4.	Kademangan	13.	Murukan
5.	Kauman	14.	Karobelah
6.	Tanggalrejo	15.	Johowinong
7.	Dukuhmojo	16.	Tejo
8.	Dukuhdimoro	17.	Kedunglumpang
9.	Gambiran	18.	Seketi

Secara lebih detail mengenai desa-desa yang terdapat dalam wilayah Kecamatan Mojoagung dapat dilihat dalam peta Kecamatan Mojoagung sebagai berikut:



Gambar 2.1

Peta Kecamatan Mojoagung

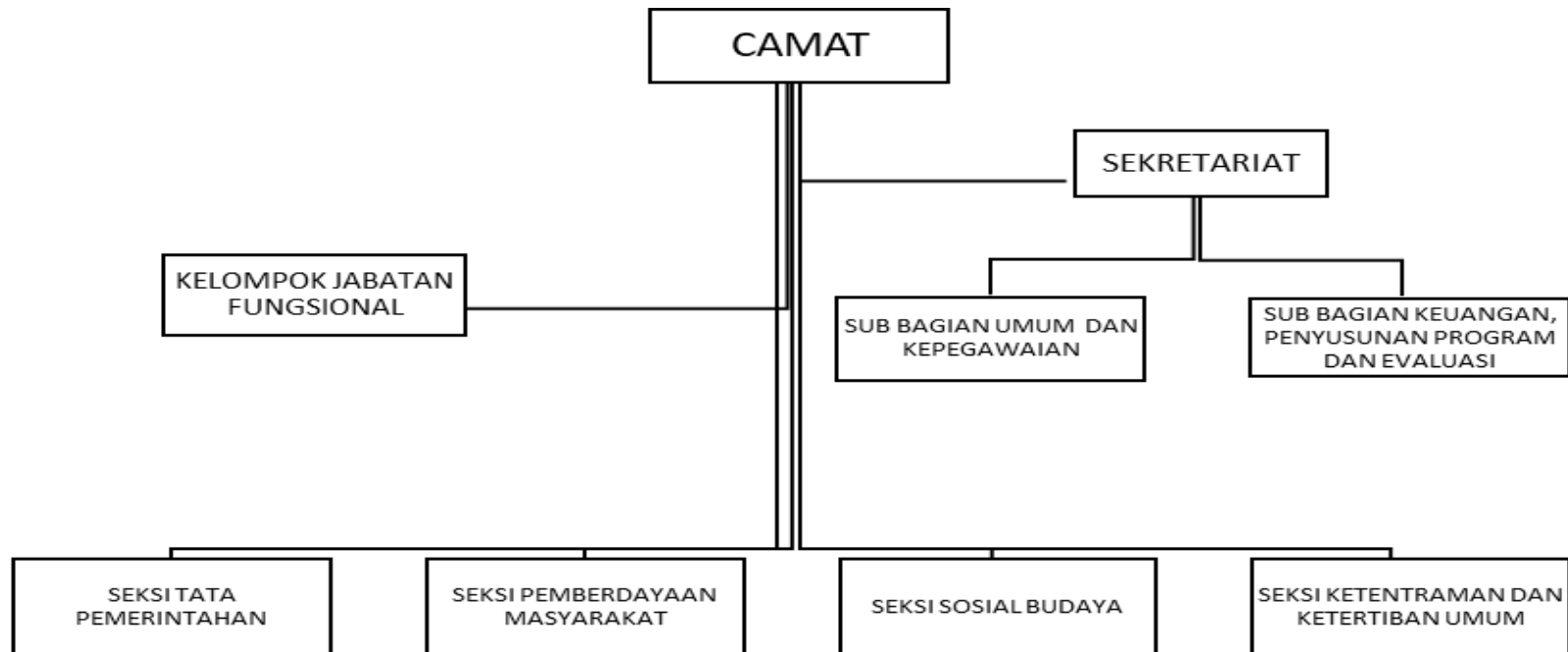
Kecamatan Mojoagung lebih dominan sebagai wilayah industri baik industri kecil, menengah, maupun industri besar. Banyaknya industri ini dikarenakan akses di Kecamatan Mojoagung yang begitu mudah, baik akses Kabupaten/Kota, maupun akses antar Provinsi. Menjadi jalur persimpangan kendaraan antar Kabupaten/Kota maupun antar Provinsi menyebabkan Kecamatan Mojoagung menjadi tempat yang tepat untuk dijadikan sebagai kawasan industri.

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang No 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, maka susunan Susunan organisasi Kecamatan di Kabupaten Jombang terdiri dari:

1. Camat ;
2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - b. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi ;
3. Seksi Tata Pemerintahan;
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
6. Seksi Sosial Budaya;
7. Kelompok Jabatan Pelaksana.

Gambar 2.2
Struktur Organisasi Kecamatan Mojoagung



Adapun tugas pokok dan fungsi Kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Camat ;

Tugas pokok Camat adalah menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah di wilayah kerjanya.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Camat mempunyai fungsi:

- (1) Penyelenggaraan kewenangan wajib Kabupaten dan kewenangan lainnya yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- (3) Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- (4) Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- (5) Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- (6) Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- (7) Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- (8) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
- (9) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan;

dan

- (10) Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Sekretariat, membawahi:

Tugas pokok Sekretariat adalah melaksanakan sebagian tugas Camat dalam melaksanakan, merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendak di bidang ketatausahaan, administrasi umum, keuangan, kepegawaian, penyusunan program dan pelaporan serta tata usaha perlengkapan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:

- (1) Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Camat dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset, penyusunan program, evaluasi dan kehumasan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat, mempunyai fungsi:
 - a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - b. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. Pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
 - e. Pengelolaan urusan rumah tangga;
 - f. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
 - g. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Seksi;
 - h. Pengelolaan kearsipan dan kehumasan;
 - i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
 - j. Pelaksanaan pengelolaan aset Kecamatan; dan

k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Sekretariat, membawahi

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:
- 1) Menyusun program kerja pelaksanaan tugas umum dan kepegawaian;
 - 2) Melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian dan tata kearsipan;
 - 3) Melaksanakan kegiatan pengadaan kebutuhan barang/jasa;
 - 4) Memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor serta melaksanakan kegiatan keprotokolan dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas;
 - 5) Menyiapkan, menyusun dan melaksanakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karir pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai di lingkungan kecamatan;
 - 6) Menghimpun data aset dan melaksanakan ketatausahaan barang;
 - 7) Mengkoordinasikan dan menyusun standar operasional prosedur dan standar pelayanan minimal;
 - 8) Melaksanakan program dan pembinaan pelayanan di bidang informasi dan komunikasi;
 - 9) Melaksanakan kegiatan kehumasan, publikasi dan dokumentasi;
 - 10) Membuat laporan hasil pengadaan barang/jasa; dan
 - 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

Sekretaris.

b. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi, mempunyai tugas:

- 1) Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan;
- 2) Menyusun rencana program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan;
- 3) Melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
- 4) Menyusun program kerja pelaksanaan tugas keuangan;
- 5) Menghimpun data dan menyusun rencana anggaran, serta melaksanakan tata usaha keuangan;
- 6) Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan meneliti serta mengoreksi kebenaran dokumen keuangan;
- 7) Memelihara dan mengamankan dokumen administrasi keuangan;
- 8) Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- 9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

10) Seksi Tata Pemerintahan, mempunyai tugas:

- 1) Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal serta instansi di lingkungan Kecamatan di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

- 2) Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan dan pengadministrasian kependudukan dan catatan sipil;
 - 3) Melaksanakan pelaksanaan urusan wajib Kabupaten dan urusan lain tingkat Kecamatan sesuai bidangnya;
 - 4) Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan aparatur dan administrasi pemerintahan desa;
 - 5) Melaksanakan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - 6) Melaksanakan evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan kepada Bupati;
 - 7) Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
 - 8) Melaksanakan perencanaan, pembinaan dan pengawasan kegiatan pelayanan dan percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal kepada masyarakat di kecamatan;
 - 9) Melaksanakan tugas pembantuan; dan
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.
- 11) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, mempunyai tugas:
- 1) Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dan forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
 - 2) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun

swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat serta terhadap perangkat Desa dan Kelurahan serta tertib administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan;

- 3) Melaksanakan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat, pemerintahan Desa/Kelurahan di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh Perangkat Daerah maupun swasta;
 - 4) Melaksanakan program dan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 5) Melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa /Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
 - 6) Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi bidang PKK; dan
 - 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.
- 12) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, mempunyai tugas:
- 1) Melaksanakan penyusunan program guna menjaga ketentraman serta ketertiban masyarakat;
 - 2) Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan bencana.

- 3) Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan perangkat Kecamatan, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
 - 4) Melaksanakan penyelenggaraan pengendalian operasional Polisi Pamong Praja Kecamatan;
 - 5) Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah, pihak lain termasuk Polri/TNI dan Pemuka Agama di wilayah kerjanya dalam rangka penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;
 - 6) Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 7) Melaksanakan koordinasi dengan pihak swasta dan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - 8) Melaksanakan laporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
 - 9) Melaksanakan pengamanan kantor Kecamatan dan rumah dinas Camat; dan
 - 10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.
-
- 13) Seksi Sosial Budaya, mempunyai tugas:
 - 1) Melaksanakan penyelenggaraan pengumpulan bahan dan data pelaksanaan, evaluasi di bidang sosial budaya;
 - 2) Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang sosial budaya;

- 3) Melaksanakan penyelenggaraan administrasi di bidang sosial budaya;
- 4) Melaksanakan penyelenggaraan fasilitasi terhadap lembaga keagamaan, pendidikan, budaya, pemuda, olah raga, ketenagakerjaan dan kesehatan masyarakat;
- 5) Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan perempuan;
- 6) Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan di tingkat Kecamatan; dan
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Disamping tupoksi tersebut Kecamatan Mojoagung juga mempunyai fungsi kewilayahan sebagai Pusat pelayanan pemerintahan, jasa komersial skala WP, pendidikan tinggi dan menengah, serta kesehatan wilayah dengan sistem kegiatan wilayah pemerintahan, perdagangan dan jasa komersial. Berdasarkan hal tersebut tupoksi (tugas pokok dan fungsi) Kecamatan Mojoagung maka implementasi dari tupoksi Kecamatan Mojoagung juga diharapkan mencapai fungsi kewilayahan tersebut.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Jumlah total sumber daya manusia yang dimiliki oleh Kecamatan Mojoagung adalah 18 Orang dengan klasifikasi golongan sebagai berikut:

Tabel 2.1

Sumber Daya PD berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan IV	2 Orang

2	Golongan III	9	Orang
3	Golongan II	5	Orang
4	Golongan 1	0	Orang
5	Golongan IX	1	Orang
6	Golongan V	1	Orang

Sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang cukup bervariasi. Berikut ini Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Jenjang Pendidikan:

Tabel 2.2

Sumber Daya PD berdasarkan Jenjang Pendidikan Formal Tahun 2025

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	Sarjana S2	2 Orang
2	Sarjana S1	8 Orang
3	Diploma III	1 Orang
4	SLTA	7 Orang
5	SLTP	0 Orang
6	SD	0 Orang

Sumber : Data Kecamatan Mojoagung

Rincian personil pegawai Kantor Kecamatan Mojoagung, mulai dari jabatan eselon III dan IV, serta staf pada Kantor Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang per bulan Juni 2025 adalah sebagaimana tersaji dalam beberapa tabel berikut:

Tabel 2.3

Pegawai Jabatan Struktural Eselon III dan IV

No	Nama	NIP	Jabatan
1	ANJIK EKO SAPUTRO, S.H., M.Si	197007271992031007	Camat Mojoagung
2	WAHYU TEGUH	198203172000121001	Sekcam Mojoagung

	WICAKSONO, S.STP		
3	ANNA SUBANDYAH R,S.Pd, M.Si	197006242008012008	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa
4	AMINATUS SA'ADAH, S.IP	196904251989122001	Kasi Tata Pemerintahan
5	DWI HERAWATI, S.IP	196904041989032008	Kasi Sosial Budaya
6	MUCHLISIN, S.IP	196805081994021001	Plt.Kasi Trantibum
7.	VITA OCTAVIANTI, SE	198610012015052002	Kasubbag Keuangan dan Sungram
8.	MUCHLISIN, S.IP	196805081994021001	Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Tabel 2.4
Staf/Pelaksana

No.	Nama	NIP	Jabatan
1	DODI ERIANTO, SE	198010142010011001	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah
2	KHALIMAH AL AZIZ	197704012010012001	Pengolah Data dan Informasi
3	SUSANTI	197711262008012009	Pengadministrasi Perkantoran
4	RUKAN	197208152010011004	Pengadministrasi Perkantoran
5	HERI SUBAGYO	196910192009061002	Pengadministrasi Perkantoran
6	HARIANTO	197412222007011009	Operator Layanan Operasional
7	SODIKIN	198001152014071000	Pengadministrasi Perkantoran
8	ROJIUN HERU WIDODO	197202072009061002	KEPALA DESA
9	MOCHAMAD NUR HIDAYANTO, S.M.	200009212025211006	Penata Layanan Operasional
10.	AS'ARI	198405252025211011	Pengadministrasi Perkantoran

Tabel 2.5
Jenjang Pendidikan Non Formal yang pernah ditempuh oleh
Sumber Daya PD

Sumber Daya	Jenis Diklat		
	Kepemimpinan	Fungsional	Teknis
Manusia			
Struktural (8 Orang)	6 Sertifikat (4 orang)	- Sertifikat	28 Sertifikat (8 orang)
Fungsional (- Orang)	- Sertifikat	- Sertifikat	- Sertifikat
Fungsional Pelaksana (11 Orang)	- Sertifikat	- Sertifikat	14 Sertifikat (7 orang)

Sumber: Data DUK Kecamatan Mojoagung

Secara keseluruhan jumlah perlengkapan kantor yang dikelola oleh Kecamatan Mojoagung dalam mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi adalah sebanyak buah Sarana dan prasarana Kerja yang Tersedia di Kecamatan Mojoagung.

Tabel 2.6
Sarana dan Prasaranan beserta Kondisinya
Inventaris Barang

No.	Nama/ Jenis Barang	Jumlah	Kondisi Barang		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6
I	Kendaraan Dinas Jabatan				
1	Kendaraan Dinas R4	2	1	-	1
2	Kendaraan Dinas R2	11	11	-	-

No.	Nama/ Jenis Barang	Jumlah	Kondisi Barang		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
II	Perlengkapan Gedung Kantor				
1	Scanner	5	5	-	-
2	AC	9	8	-	1
3	Mesin Tik manual	1	-	-	1
4	Rak Besi	3	3		
5	Filling Besi	10	10	-	
6	Rak Kayu	2	2	-	
7	White Board	3	2	1	
8	Lemari Kayu	2	2	-	
9	Zice	2	2	-	
10	Tempat Tidur Kayu	1	1	-	
11	Meja Rapat	7	6	1	
12	Meja Kerja	20	15	5	
13	Kursi Rapat	187	150	37	
14	Kursi Biasa	28	28		
15	Kursi Besi	6	4	6	2
16	Bangku Tunggu	5	5		
17	Kursi Lipat	95	50	45	
18	Meja Resepsionis	2	2	-	
19	Jam	-	-		

No.	Nama/ Jenis Barang	Jumlah	Kondisi Barang		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
20	Kipas Angin	12	9	4	
21	Kompor Gas	1			1
22	Alat Dapur lainnya	1 set			
23	Televisi	5	5		
24	Podium	1	1		
25	P C	11	9	2	
26	Laptop	9	8		1
27	Notebook	4	4		2
28	Printer	17	14	-	3
29	CCTV	1 set	1 set		
30	Monitor	1			
31	Meja kerja pejabat eselon III	1	1		
32	Kursi kerja pejabat eselon III	1	1		
33	Kursi kerja pejabat eselon IV	1	1		
34	Camera + attachment	1	1		
35	Telephone Hybrid	1	-		1
36	Mesin Pres	-	-		
37	Soundsystem	2	2		

No.	Nama/ Jenis Barang	Jumlah	Kondisi Barang		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
38	Tape recorder	1			1
39	Adaptor	-			-
40	Alat pemadam kebakaran	3	3		
41	Digital LED Running Text	1	1		
42	Mesin Absensi	1	1		
43	Papan Nama Instansi	2	2		
44	Layar Film Projector	1	1		
45	Rak Buku				
46	APE (Alat Permainan Edukatif)	1	1		
47	Papan Pengumuman	1	1		

Sumber Data: Daftar Inventaris Barang

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Kecamatan berdasarkan sasaran/target Renstra Kecamatan periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Kecamatan dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Mojoagung
Kabupaten Jombang

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target (SPI)	Target (IKK)	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Renstra PD Tahun 2018-2023																		
	Sasaran : Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah																		
	Nilai Evaluasi SAKIP				65,23	N/A	N/A	N/A	N/A	64,02	N/A	N/A	N/A	N/A	89,2%	98,15%	N/A	N/A	N/A

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SP	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran				100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A
	Jumlah pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran				17 rekening	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan				100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor				62 unit	N/A	N/A	N/A	N/A	62 unit	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A
	Jumlah gedung kantor/bangunan pendukungnya yang dipelihara				5 unit	N/A	N/A	N/A	N/A	0 unit	N/A	N/A	N/A	N/A	0%	N/A	N/A	N/A	N/A
	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara				25 unit	N/A	N/A	N/A	N/A	25 unit	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A
	Jumlah kendaraan dinas/kendaraan operasional yang dipelihara				2 unit	N/A	N/A	N/A	N/A	0 unit	N/A	N/A	N/A	N/A	0%	N/A	N/A	N/A	N/A

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Jumlah Pengadaan Pakaian Olahraga				26 stel	N/A	N/A	N/A	N/A	0 stel	N/A	N/A	N/A	N/A	0%	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Persentase dokumen Perencanaan dan laporan keuangan yang tersusun tepat waktu				100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A
	Jumlah Dokumen Renja yang disusun				2 dok	N/A	N/A	N/A	N/A	2 dok	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A
	Jumlah Dokumen LKJIP yang disusun				2 dok	N/A	N/A	N/A	N/A	2 dok	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A
	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang disusun				2 dok	N/A	N/A	N/A	N/A	2 dok	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SP	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan																		
4	NILAI SINERGITAS KINERJA KECAMATAN MOJOAGUNG MINIMAL BAIK				75	N/A	N/A	N/A	N/A	63,16	N/A	N/A	N/A	N/A	84,21%	N/A	N/A	N/A	N/A
	Nilai Komponen Sinergitas Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum				8 komponen	N/A	N/A	N/A	N/A	8 komponen	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A
	Nilai Komponen Sinergitas Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				11 komponen	N/A	N/A	N/A	N/A	11 komponen	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target et (SPI)	Target et (IKK)	Target indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Nilai Komponen Sinergitas Bidang Sosial Budaya				komponen	N/A	N/A	N/A	N/A	komponen	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A
	Nilai Komponen Sinergitas Bidang Pemerintahan dan Umum				22 komponen	N/A	N/A	N/A	N/A	22 komponen	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A
Perubahan P-Renstra PD Tahun 2018 - 2023 (2021)																			
Sasaran : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan Mojoagung																			

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SP	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1.	NILAI EVALUASI AKIP Kecamatan				N/A	70,01	N/A	N/A	N/A	N/A	71,24	N/A	N/A	N/A	N/A	101,76%	N/A	N/A	N/A
1.	Persentase rata-rata kinerja aparatur				N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	101,76%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A
1.1	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan				N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A
1.1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun				N/A	3 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SP	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1.1	Jumlah laporan edung kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun				N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A
1.2	1. Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2. Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan				N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target	Target	Target	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1.2.1	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN lingkup Kecamatan Mojoagung yang difasilitasi				N/A	14 bulan	N/A	N/A	N/A	N/A	14 bulan	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A
1.2.2	Jumlah pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	
1.2.3	Jumlah dokumen laporan keuangan tahunan SKPD				N/A	1 dok	N/A	N/A	N/A	N/A	1 dok	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	
1.3	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran				N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1.3.1	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi				N/A	7 jenis	N/A	N/A	N/A	N/A	7 jenis	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A
1.3.2	Jumlah komponen instalasi listrik yang terfasilitasi				N/A	4 jenis	N/A	N/A	N/A	N/A	4 jenis	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A
1.3.3	Jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai yang terfasilitasi				N/A	6006 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	6006 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A
1.3.4	Jumlah pemenuhan barang cetak				N/A	12 buku	N/A	N/A	N/A	N/A	12 buku	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A
1.3.5	Jumlah pemenuhan barang penggandaan				N/A	7500 lembar	N/A	N/A	N/A	N/A	7500 lembar	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SP	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1.3.6	Jumlah pemenuhan bahan bacaan				N/A	1 jenis	N/A	N/A	N/A	N/A	1 jenis	N/A	N/A	N/A	N/A	1 jenis	N/A	N/A	N/A
1.3.7	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				N/A	165 kali	N/A	N/A	N/A	N/A	165 kali	N/A	N/A	N/A	N/A	165 kali	N/A	N/A	N/A
1.4	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian Kecamatan Mojoagung				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1.4.1	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang terfasilitasi				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SP	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1.5	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur				N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A
1.5.1	Jumlah pengadaan sarana gedung kantor				N/A	1 unit	N/A	N/A	N/A	N/A	1 unit	N/A	N/A	N/A	N/A	1 unit	N/A	N/A	N/A
1.6	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah				N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A
	Jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang terfasilitasi				N/A	12 bulan	N/A	N/A	N/A	N/A	12 bulan	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SP	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Jumlah pemenuhan jenis pelayanan umum				N/A	4 jenis	N/A	N/A	N/A	N/A	4 jenis	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A
1.7	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara				N/A	2 unit	N/A	N/A	N/A	N/A	2 unit	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dibayarkan pajaknya				N/A	26 unit	N/A	N/A	N/A	N/A	26 unit	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SP	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya Kecamatan Mojoagung yang dipelihara				N/A	5 gedung	N/A	N/A	N/A	N/A	5 gedung	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A
	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara				N/A	25 unit	N/A	N/A	N/A	N/A	25 unit	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A
							N/A	N/A	N/A										
	INDEKS KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				N/A	7,94	N/A	N/A	N/A	N/A	7,94	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2.	IKM KECAMATAN MOJOAGUNG				N/A	87,64	N/A	N/A	N/A	N/A	90,55	N/A	N/A	N/A	N/A	103,32%	N/A	N/A	N/A
3.	IPP KECAMATAN MOJOAGUNG				N/A	3,7	N/A	N/A	N/A	N/A	3,301	N/A	N/A	N/A	N/A	89,22%	N/A	N/A	N/A
2.	Nilai PATEN Kecamatan				N/A	83	N/A	N/A	N/A	N/A	83,01	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A
	KEGIATAN :						N/A	N/A	N/A										

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SP	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
2.1	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar				N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A
2.1	Persentase pengajuan pelayanan Adminduk yang diverifikasi				N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A
	Persentase pengajuan perizinan yang diverifikasi				N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A
3.	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan				N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti				N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A
3.1	KEGIATAN						N/A	N/A	N/A										
	Jumlah Laporan Pelaksanaan PHBN/PHBA				N/A	2 laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	2 laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A
	Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam				N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Jumlah kegiatan PHBN/PHBA yang dilaksanakan				N/A	2 kegiatan	N/A	N/A	N/A	N/A	2 kegiatan	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Forkopimcam				N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target	Target	Target	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
4.	Persentase laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait				N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A
4.	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait				N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A
	KEGIATAN				N/A		N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SP	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum				N/A	12 laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	12 laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A
	Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan				N/A	12 kegiatan	N/A	N/A	N/A	N/A	12 kegiatan	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A
5.	Persentase Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa Tepat Waktu				N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SP	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
5.	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa				N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A
	Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti				N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A
	KEGIATAN																		
	Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa				N/A	36 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	36 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SP	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa				N/A	36 laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	36 laporan		N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A
6.	Persentase Evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu				N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%		N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SP	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
6.	1. Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi 2. Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina				N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	
	KEGIATAN								N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Raperdes Perubahan APB Desa yang tepat waktu				N/A	N/A	36 dok	36 dok	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SP	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina				N/A	N/A	36 lembaga	36 lembaga	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	
	SUB KEGIATAN Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa				N/A	N/A	36 dokumen	36 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	
	Jumlah BUMDesa yang dikoordinasikan				N/A	N/A	18 BUMDesa	18 BUMDesa	N/A	N/A	N/A	18 BUMDesa	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	
	Jumlah TP PKK yang dikoordinasikan				N/A	N/A	18 TP PKK Desa	18 TP PKK Desa	N/A	N/A	N/A	18 TP PKK Desa	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SP	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Perubahan P-Renstra PD Tahun 2018 - 2023 (2022)																		
	Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan Mojoagung																		
	INDEKS REFORMASI BIROKRASI				N/A	N/A	73,39		N/A	N/A	60,89	N/A	N/A	N/A	N/A	82,96%	N/A	N/A	
1.	NILAI EVALUASI AKIP Kecamatan				N/A	N/A	72		N/A	N/A	71,24	N/A	N/A	N/A	N/A	101,76%	N/A	N/A	
1.	Persentase rata-rata kinerja aparatur				N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SP	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1.1	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan				N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	
1.1.1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun				N/A	N/A	3 dokumen	2 dokumen	N/A	N/A	N/A	3 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A
1.1.2	Jumlah laporan edung kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun				N/A	N/A	1 dokumen	1 dokumen	N/A	N/A	N/A	1 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SP	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1.2	1. Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan				N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	
1.2	.1 Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN lingkup Kecamatan Mojoagung yang difasilitasi				N/A	N/A	14 bulan	14 bulan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SP	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1.2.2	Jumlah pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD				N/A	N/A	N/A	12 kali	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	
1.2.3	Jumlah dokumen laporan keuangan tahunan SKPD				N/A	N/A	1 dok	1 dok	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	
1.3	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran				N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	
1.3.1	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi				N/A	N/A	7 jenis	7 jenis	N/A	N/A	N/A	7 jenis	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A
1.3.2	Jumlah komponen instalasi listrik yang terfasilitasi				N/A	N/A	4 jenis	4 jenis	N/A	N/A	N/A	4 jenis	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SP	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1.3.3	Jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai yang terfasilitasi				N/A	N/A	6006 orang	0 orang	N/A	N/A	N/A	6006 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A
1.3.4	Jumlah pemenuhan barang cetak				N/A	N/A	12 buku	8 buku	N/A	N/A	N/A	12 buku	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A
1.3.5	Jumlah pemenuhan barang penggandaan				N/A	N/A	7500 lembar	7500 lembar	N/A	N/A	N/A	7500 lembar	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A
1.3.6	Jumlah pemenuhan bahan bacaan				N/A	N/A	1 jenis	1 jenis	N/A	N/A	N/A	1 jenis	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A
1.3.7	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				N/A	N/A	165 kali	2 kali	N/A	N/A	N/A	165 kali	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SP	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1.4	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian Kecamatan Mojoagung				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
1.4.1	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang terfasilitasi				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
1.5	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur				N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A
1.5.1	Jumlah pengadaan sarana gedung kantor				N/A	N/A	1 unit	36 unit	N/A	N/A	N/A	1 unit	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target	Target	Target	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1.6	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah				N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	
	Jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang terfasilitasi				N/A	N/A	12 bulan	12 bulan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	
	Jumlah pemenuhan jenis pelayanan umum				N/A	N/A	4 jenis	4 jenis	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SP	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1.7	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara				N/A	N/A	2 unit	2 unit	N/A	N/A	N/A	2 unit	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dibayarkan pajaknya				N/A	N/A	26 unit	16 unit	N/A	N/A	N/A	26 unit	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A
	Jumlah edung kantor dan bangunan lainnya Kecamatan Mojoagung yang dipelihara				N/A	N/A	5 gedung	5 gedung	N/A	N/A	N/A	5 gedung	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPK	Target IKK	Target lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara				N/A	N/A	25 unit	35 unit	N/A	N/A	N/A	25 unit	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A
								N/A											
	INDEKS KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				N/A	N/A	7,94	7,91	N/A	N/A	N/A	7,94	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Sasaran : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan							N/A											
2.	IKM KECAMATAN MOJOAGUNG				N/A	N/A	87,64	91,50	N/A	N/A	N/A	90,55	N/A	N/A	N/A	N/A	103,32%	N/A	N/A
3.	IPP KECAMATAN MOJOAGUNG				N/A	N/A	3,7	3,75	N/A	N/A	N/A	3,301	N/A	N/A	N/A	N/A	89,22%	N/A	N/A
2.	Nilai PATEN Kecamatan				N/A	N/A	83	83,50	N/A	N/A	82,76	83,01	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SP	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	KEGIATAN :								N/A										
2.1	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar				N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A
2.1	Persentase pengajuan pelayanan Adminduk yang diverifikasi				N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A
	Persentase pengajuan perizinan yang diverifikasi				N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A
3.	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan				N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti				N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A
3.1	KEGIATAN								N/A										
	Jumlah Laporan Pelaksanaan PHBN/PHBA				N/A	N/A	2 laporan	2 laporan	N/A	N/A	N/A	2 laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A
	Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam				N/A	N/A	0	4 dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Jumlah kegiatan PHBN/PHBA yang dilaksanakan				N/A	N/A	2 kegiatan	2 kegiatan	N/A	N/A	N/A	2 kegiatan	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Forkopimcam				N/A	N/A	-	1 laporan	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SP	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
4.	Persentase laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait				N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A
4.	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait				N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A
	KEGIATAN				N/A	N/A			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SP	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum				N/A	N/A	12 laporan	12 laporan	N/A	N/A	N/A	12 laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A
	Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan				N/A	N/A	12 kegiatan	12 kegiatan	N/A	N/A	N/A	12 kegiatan	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A
									N/A										
5.	Persentase Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa Tepat Waktu				N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SP	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
5.	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa				N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A
	Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti				N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A
	KEGIATAN								N/A								100%		
	Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa				N/A	N/A	36 dokumen	36 dokumen	N/A	N/A	N/A	36 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SP	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa				N/A	N/A	36 laporan	36 laporan	N/A	N/A	N/A	36 laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A
								N/A									100%		
6.	Persentase Evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu				N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target et ISPI	Target et IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
6.	1. Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi 2. Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina				N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	
	KEGIATAN								N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Raperdes Perubahan APB Desa yang tepat waktu				N/A	N/A	36 dok	36 dok	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SP	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina				N/A	N/A	36 lembaga	36 lembaga	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	
	SUB KEGIATAN Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa				N/A	N/A	36 dokumen	36 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	
	Jumlah BUMDesa yang dikoordinasikan				N/A	N/A	18 BUMDesa	18 BUMDesa	N/A	N/A	N/A	18 BUMDesa	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	
	Jumlah TP PKK yang dikoordinasikan				N/A	N/A	18 TP PKK Desa	18 TP PKK Desa	N/A	N/A	N/A	18 TP PKK Desa	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SP	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Perubahan P-Renstra PD Tahun 2018 - 2023 (2022) Kepmendagri 050-05889																		
	I. Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan Mojoagung																		
	INDEKS REFORMASI BIROKRASI				N/A	N/A	N/A	76,00	N/A	N/A	N/A	74	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
1.	NILAI SAKIP				N/A	N/A	N/A	72,10	N/A	N/A	N/A	73,12	N/A	N/A	N/A	N/A	100,86%	N/A	
1.	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur				N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SP	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1.1	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan				N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	
1.1.1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				N/A	N/A	N/A	2 dokumen	N/A	N/A	N/A	2 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	
1.1.2	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				N/A	N/A	N/A	5 dokumen	N/A	N/A	N/A	5 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1.2	1. Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2. Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan				N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	
1.2.1	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				N/A	N/A	N/A	20 orang	N/A	N/A	N/A	20 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	
1.2.2	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				N/A	N/A	N/A	12 dok	N/A	N/A	N/A	12 dok	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SP	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1.2.3	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				N/A	N/A	N/A	1 dok	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A
1.3	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran				N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A
1.3.1	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				N/A	N/A	N/A	7 paket	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SP	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1.3.2	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				N/A	N/A	N/A	6 paket	N/A	N/A	N/A	6 paket	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	
1.3.3	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				N/A	N/A	N/A	12 bulan	N/A	N/A	N/A	12 bulan	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	
1.3.4	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				N/A	N/A	N/A	12 paket	N/A	N/A	N/A	12 paket	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	
1.3.6	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				N/A	N/A	N/A	1 dok	N/A	N/A	N/A	1 dok	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SP	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1.3.7	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				N/A	N/A	N/A	4 laporan	N/A	N/A	N/A	4 laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	
1.4	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian Kecamatan Mojoagung				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	
1.4.1	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
1.5	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur				N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SP	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1.5	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				N/A	N/A	N/A	59 unit	N/A	N/A	N/A	59 unit	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A
1.6	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah				N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				N/A	N/A	24 laporan	N/A	N/A	N/A	24 laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				N/A	N/A	N/A	4 laporan	N/A	N/A	N/A	4 laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	
1.7	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				N/A	N/A	N/A	15 unit	N/A	N/A	N/A	15 unit	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SP	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				N/A	N/A	N/A	5 unit	N/A	N/A	N/A	5 unit	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				N/A	N/A	30 unit	N/A	N/A	N/A	30 unit	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	
2.	Sasaran : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan																		
	INDEKS KUALITAS LAYANAN PUBLIK				N/A	N/A	8,09	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SP	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
2.	IKM KECAMATAN MOJOAGUNG				N/A	N/A	N/A	93,50	N/A	N/A	N/A	98,15	N/A	N/A	N/A	N/A	104,9%	N/A	
3.	IPP KECAMATAN MOJOAGUNG				N/A	N/A	N/A	3,45	N/A	N/A	N/A	3,74	N/A	N/A	N/A	N/A	108,41%	N/A	
2.	Nilai PATEN Kecamatan				N/A	N/A	N/A	82	N/A	N/A	N/A	92,57	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	
	KEGIATAN :						N/A			N/A									
2.1	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar				N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	
2.1	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				N/A	N/A	N/A	12 laporan	N/A	N/A	N/A	12 laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SP	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
3.	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan				N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	
	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti				N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	
3.1	KEGIATAN						N/A										100%		
	Jumlah Laporan Pelaksanaan PHBN/PHBA				N/A	N/A	N/A	2 laporan	N/A	N/A	N/A	2 laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	
	Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam				N/A	N/A	N/A	4 dokumen	N/A	N/A	N/A	4 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				N/A	N/A	N/A	100 orang	N/A	N/A	N/A	100 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SP	Target IKK	Target lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				N/A	N/A	N/A	4 dokumen	N/A	N/A	N/A	4 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	
																	100%		
4.	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait				N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	
	KEGIATAN								N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan				N/A	N/A	N/A	12 kegiatan	N/A	N/A	N/A	12 kegiatan	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SP	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.				N/A	N/A	N/A	12 laporan	N/A	N/A	N/A	12 laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	
5.	Persentase Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa Tepat Waktu				N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SP	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
5.	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa				N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	
	Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti				N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	
	KEGIATAN																100%		
	Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa				N/A	N/A	N/A	36 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SP	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Jumlah Dokumen yang difasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				N/A	N/A	N/A	36 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	36 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A
6.	Persentase Evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu			N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SP	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
6.	1. Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi 2. Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina			N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	KEGIATAN							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina			N/A	N/A	N/A	N/A	36 lembaga	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Farg	Targ et	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	SUB KEGIATAN Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Renstra 2024-2026																			
RPD Kepmendagri 900																			
	Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan																		
	Target : Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Mojoagung				N/A	N/A	N/A	N/A	73,5	N/A	N/A	N/A	N/A	73,48	N/A	N/A	N/A	N/A	99,97%

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota				N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				N/A	N/A	N/A	N/A	2 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	2 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	100%
	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				N/A	N/A	N/A	N/A	5 laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	5 laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	100%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				N/A	N/A	N/A	N/A	18 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	18 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	100%

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD				N/A	N/A	N/A	N/A	12 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	12 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %
	3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD				N/A	N/A	N/A	N/A	1 laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	1 laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %
	1. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya				N/A	N/A	N/A	N/A	2 paket	N/A	N/A	N/A	N/A	2 paket	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %
	1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.				N/A	N/A	N/A	N/A	3 paket	N/A	N/A	N/A	N/A	3 paket	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SP	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				N/A	N/A	N/A	N/A	1 paket	N/A	N/A	N/A	N/A	1 paket	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %
	3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor				N/A	N/A	N/A	N/A	1 paket	N/A	N/A	N/A	N/A	1 paket	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %
	4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				N/A	N/A	N/A	N/A	2 paket	N/A	N/A	N/A	N/A	2 paket	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %
	5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				N/A	N/A	N/A	N/A	1 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	1 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %
	6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				N/A	N/A	N/A	N/A	4 laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	4 laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %
	Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah				N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SP	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				N/A	N/A	N/A	N/A	0 unit	N/A	N/A	N/A	N/A	0 unit	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				N/A	N/A	N/A	N/A	40 unit	N/A	N/A	N/A	N/A	40 unit	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %
	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik				N/A	N/A	N/A	N/A	24 laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	24 laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %
	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				N/A	N/A	N/A	N/A	24 laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	24 laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SP	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan				N/A	N/A	N/A	N/A	13 unit	N/A	N/A	N/A	N/A	13 unit	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %
	2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				N/A	N/A	N/A	N/A	5 unit	N/A	N/A	N/A	N/A	5 unit	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %
	3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				N/A	N/A	N/A	N/A	22 unit	N/A	N/A	N/A	N/A	22 unit	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				N/A	N/A	N/A	N/A	93	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	- 100 %

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Farg et	Targ et	Target Indikator r lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan				N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%
	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				N/A	N/A	N/A	N/A	12 laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	12 laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	100%
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				N/A	N/A	N/A	N/A	5 laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	5 laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	100%

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SP	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
									4 laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	4 laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				N/A	N/A	N/A	N/A	100 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	100 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				N/A	N/A	N/A	N/A	4 laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	4 laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %
	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum				N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				N/A	N/A	N/A	N/A	12 laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	12 laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SP	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				N/A	N/A	N/A	N/A	12 laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	12 laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				N/A	N/A	N/A	N/A	18 desa	N/A	N/A	N/A	N/A	18 desa	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				N/A	N/A	N/A	N/A	36 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	36 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SP	Target IKK	Target lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				N/A	N/A	N/A	N/A	36 lembaga	N/A	N/A	N/A	N/A	36 lembaga	N/A	N/A	N/A	N/A	100%
					N/A	N/A	N/A	N/A	18 Desa	N/A	N/A	N/A	N/A	18 Desa	N/A	N/A	N/A	N/A	100%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				N/A	N/A	N/A	N/A	108 lembaga	N/A	N/A	N/A	N/A	108 lembaga	N/A	N/A	N/A	N/A	100%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				N/A	N/A	N/A	N/A	4 laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	4 laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	100%

Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Mojoagung
Kabupaten Jombang

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2020)	2(2021)	3(2022)	4(2023)	5 (2024)	1 (2020)	2(2021)	3(2022)	4(2023)	5 (2024)	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
RENSTRA PD TAHUN 2018 - 2023																	
Program Pelayanan administrasi perkantoran	167,718,510	N/A	N/A	N/A	N/A	164,007,822	N/A	N/A	N/A	N/A	99	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	167,718,510	N/A	N/A	N/A	N/A	164,007,822	N/A	N/A	N/A	N/A	99	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	405,482,500	N/A	N/A	N/A	N/A	398,817,150	N/A	N/A	N/A	N/A	99	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor	197,491,500	N/A	N/A	N/A	N/A	195,569,150	N/A	N/A	N/A	N/A	98	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang/berat	200,000,000	N/A	N/A	N/A	N/A	195,257,000	N/A	N/A	N/A	N/A	99	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2020)	2(2021)	3(2022)	4(2023)	5 (2024)	1 (2020)	2(2021)	3(2022)	4(2023)	5 (2024)	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
gedung kantor/bangunan pendukungnya																	
Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor	7,991,000	N/A	N/A	N/A	N/A	7,991,000	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	13.03	N/A	N/A
Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional	-	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya	-	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Program Perencanaan strategis dan pelaporan capaian kinerja serta keuangan SKPD	7,230,000	N/A	N/A	N/A	N/A	7,230,000	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	-289.00	N/A	N/A
Penyusunan rencana strategis SKPD	-	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Penyusunan Rencana Kerja SKPD	4,080,000	N/A	N/A	N/A	N/A	4,080,000	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	-272.55	N/A	N/A

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2020)	2(2021)	3(2022)	4(2023)	5 (2024)	1 (2020)	2(2021)	3(2022)	4(2023)	5 (2024)	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD	3,150,000	N/A	N/A	N/A	N/A	3,150,000	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Penyusunan laporan keuangan SKPD	-	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Program Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan	55,350,000	N/A	N/A	N/A	N/A	55,350,000	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	4,900,000	N/A	N/A	N/A	N/A	4,900,000	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	27,250,000	N/A	N/A	N/A	N/A	27,250,000	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Sosial Budaya	5,850,000	N/A	N/A	N/A	N/A	5,850,000	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2020)	2(2021)	3(2022)	4(2023)	5 (2024)	1 (2020)	2(2021)	3(2022)	4(2023)	5 (2024)	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Desa	17,350,000	N/A	N/A	N/A	N/A	17,350,000	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PERUBAHAN RENSTRA PD TH 2018 - 2023																	
Program:																	
Penunjang Urusan Pemerintahanan Daerah Kabupaten/ kota	N/A	3,472,374,546	3,198,353,375	N/A	N/A	N/A	2,606,839,991	2,818,728,451	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-0.086	N/A
Kegiatan:																	
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	N/A	13,194,500	4,167,600	N/A	N/A	N/A	12,664,500	4,167,600	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-2.17	N/A
Sub Kegiatan :																	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	N/A	8,439,000	2,547,600	N/A	N/A	N/A	8,039,000	2,547,600	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-2.31	N/A
Koordinasi dan Penyusunan	N/A	4,755,500	1,620,000	N/A	N/A	N/A	4,625,500	1,620,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-1.94	N/A

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2020)	2(2021)	3(2022)	4(2023)	5 (2024)	1 (2020)	2(2021)	3(2022)	4(2023)	5 (2024)	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	N/A	3,176,087,886	2,991,570,375	N/A	N/A	N/A	2,138,377,662	2,500,245,810	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0617	N/A
Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	N/A	3,170,087,886	2,918,212,375	N/A	N/A	N/A	2,133,007,662	2,426,887,810	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A
Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	N/A		71,598,000	N/A	N/A	N/A	-	71,598,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	N/A	6,000,000	1,760,000	N/A	N/A	N/A	5,370,000	1,760,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-2.41	N/A
Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	N/A			N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Sub Kegiatan : Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2020)	2(2021)	3(2022)	4(2023)	5 (2024)	1 (2020)	2(2021)	3(2022)	4(2023)	5 (2024)	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	N/A	94,177,660	20,408,500	N/A	N/A	N/A	102,115,660	20,408,500	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-3.61	N/A
Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	N/A	10,882,660	9,594,800	N/A	N/A	N/A	16,410,660	9,594,800	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-0.13	N/A
Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	N/A	60,060,000	0	N/A	N/A	N/A	53,130,000	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	N/A	2,151,000	4,689,000	N/A	N/A	N/A	2,151,000	4,689,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.54	N/A
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	N/A	2,400,000	2,352,000	N/A	N/A	N/A	2,400,000	2,352,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-0.02	N/A
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	N/A	18,684,000	2,972,000	N/A	N/A	N/A	28,024,000	2,972,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-5.29	N/A
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	N/A	-	800,700	N/A	N/A	N/A	-		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.00	N/A

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2020)	2(2021)	3(2022)	4(2023)	5 (2024)	1 (2020)	2(2021)	3(2022)	4(2023)	5 (2024)	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Kegiatan: Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	N/A	11,438,900	36,648,000	N/A	N/A	N/A	10,995,000	36,648,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.69	N/A
Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	N/A	11,438,900	36,648,000	N/A	N/A	N/A	10,995,000	36,648,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.69	N/A
Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	N/A	100,856,000	98,846,900	N/A	N/A	N/A	107,374,569	98,846,900	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.020	N/A
Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	N/A	14,832,000	32,846,900	N/A	N/A	N/A	21,461,468	32,846,900	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.55	N/A
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	N/A	86,024,000	66,000,000	N/A	N/A	N/A	85,913,101	66,000,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-0.30	N/A
Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	N/A	76,619,600	46,712,000	N/A	N/A	N/A	235,312,600	46,712,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-0.64	N/A

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2020)	2(2021)	3(2022)	4(2023)	5 (2024)	1 (2020)	2(2021)	3(2022)	4(2023)	5 (2024)	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Daerah																	
Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	N/A	46,825,000	30,660,000	N/A	N/A	N/A	46,825,000	30,660,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-0.53	N/A
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	N/A	19,394,600	8,452,000	N/A	N/A	N/A	19,394,600	8,452,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-1.29	N/A
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	N/A	10,400,000	7,600,000	N/A	N/A	N/A	10,400,000	7,600,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-0.37	N/A
Program: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	N/A	18,720,000	4,700,000	N/A	N/A	N/A	18,720,000	4,700,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-2.98	N/A

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2020)	2(2021)	3(2022)	4(2023)	5 (2024)	1 (2020)	2(2021)	3(2022)	4(2023)	5 (2024)	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	N/A	18,720,000	4,700,000	N/A	N/A	N/A	18,720,000	4,700,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-2.98	N/A
Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	N/A	18,720,000	4,700,000	N/A	N/A	N/A	18,720,000	4,700,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-2.98	N/A
Program: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	N/A	24,256,200	2,350,000	N/A	N/A	N/A	24,256,200	2,350,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	N/A	24,256,200	2,350,000	N/A	N/A	N/A	24,256,200	2,350,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Sub Kegiatan: Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan	N/A	24,256,200	2,100,000	N/A	N/A	N/A	24,256,200	2,100,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2020)	2(2021)	3(2022)	4(2023)	5 (2024)	1 (2020)	2(2021)	3(2022)	4(2023)	5 (2024)	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Kebangsaan dan Ketahanan Nasional																	
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	N/A		250,000	N/A	N/A	N/A	-	250,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Program: Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	N/A	9,650,000	3,850,000	N/A	N/A	N/A	9,000,000	3,850,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-1.51	N/A
Kegiatan: Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	N/A	9,650,000	3,850,000	N/A	N/A	N/A	9,000,000	3,850,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-1.51	N/A
Sub Kegiatan: Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	N/A	9,650,000	3,850,000	N/A	N/A	N/A	9,000,000	3,850,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-1.51	N/A

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2020)	2(2021)	3(2022)	4(2023)	5 (2024)	1 (2020)	2(2021)	3(2022)	4(2023)	5 (2024)	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program: Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	N/A	11,400,000	10,185,400	N/A	N/A	N/A	11,400,000	10,185,400	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.12	N/A
Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	N/A	11,400,000	10,185,400	N/A	N/A	N/A	11,400,000	10,185,400	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.12	N/A
Sub Kegiatan: Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	N/A	11,400,000	10,185,400	N/A	N/A	N/A	11,400,000	10,185,400	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.12	N/A
Program: Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	N/A	40,647,600	21,961,600	N/A	N/A	N/A	40,647,600	21,961,600	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-1.72	N/A
Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	N/A	40,647,600	21,961,600	N/A	N/A	N/A	40,647,600	21,961,600	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-1.72	N/A
Sub Kegiatan: Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	N/A	40,647,600	21,961,600	N/A	N/A	N/A	40,647,600	21,961,600	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-1.72	N/A

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2020)	2(2021)	3(2022)	4(2023)	5 (2024)	1 (2020)	2(2021)	3(2022)	4(2023)	5 (2024)	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Desa																	
PERUBAHAN RENSTRA PD TH 2018 - 2023 (KEPMENDAGRI 050-05889)																	
Program:																	
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	N/A	N/A	N/A	3.188.430.224	N/A	N/A	N/A	N/A	2.994.043.720	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Kegiatan:																	
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	N/A	N/A	N/A	7.198.200	N/A	N/A	N/A	N/A	7.198.200	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Sub Kegiatan :																	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	N/A	N/A	N/A	5.868.200	N/A	N/A	N/A	N/A	5.868.200	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	N/A	N/A	N/A	2.050.000	N/A	N/A	N/A	N/A	2.050.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Kegiatan:	N/A	N/A	N/A	2.609.978.2	N/A	N/A	N/A	N/A	2.428.1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2020)	2(2021)	3(2022)	4(2023)	5 (2024)	1 (2020)	2(2021)	3(2022)	4(2023)	5 (2024)	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				74					15.652								
Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	N/A	N/A	N/A	2.535.355.274	N/A	N/A	N/A	N/A	2.353.492.652	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	N/A	N/A	N/A	71,598,000	N/A	N/A	N/A	N/A	71,598,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	N/A	N/A	N/A	3.025.000	N/A	N/A	N/A	N/A	3.025.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Sub Kegiatan : Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	N/A	N/A	N/A	103.341.600	N/A	N/A	N/A	N/A	97.274.400	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2020)	2(2021)	3(2022)	4(2023)	5 (2024)	1 (2020)	2(2021)	3(2022)	4(2023)	5 (2024)	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	N/A	N/A	N/A	15.769.500	N/A	N/A	N/A	N/A	15.752.300	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	N/A	N/A	N/A	50.820.000	N/A	N/A	N/A	N/A	44.770.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	N/A	N/A	N/A	6.652.800	N/A	N/A	N/A	N/A	6.652.800	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	N/A	N/A	N/A	2,352,000	N/A	N/A	N/A	N/A	2,352,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	N/A	N/A	N/A	26.780.000	N/A	N/A	N/A	N/A	26.780.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	N/A	N/A	N/A	967.300	N/A	N/A	N/A	N/A	967.300	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2020)	2(2021)	3(2022)	4(2023)	5 (2024)	1 (2020)	2(2021)	3(2022)	4(2023)	5 (2024)	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Kegiatan: Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	N/A	N/A	N/A	96.335.985	N/A	N/A	N/A	N/A	95.422.500	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	N/A	N/A	N/A	96.335.985	N/A	N/A	N/A	N/A	95.422.500	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	N/A	N/A	N/A	100.123.165	N/A	N/A	N/A	N/A	99.990.626	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	N/A	N/A	N/A	100.123.165	N/A	N/A	N/A	N/A	99.990.626	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2020)	2(2021)	3(2022)	4(2023)	5 (2024)	1 (2020)	2(2021)	3(2022)	4(2023)	5 (2024)	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	N/A	N/A	N/A	74.400.000	N/A	N/A	N/A	N/A	74.338.448	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	N/A	N/A	N/A	270.733.000	N/A	N/A	N/A	N/A	265.322.342	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	N/A	N/A	N/A	37.248.000	N/A	N/A	N/A	N/A	37.247.342	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	N/A	N/A	N/A	219.335.000	N/A	N/A	N/A	N/A	213.925.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2020)	2(2021)	3(2022)	4(2023)	5 (2024)	1 (2020)	2(2021)	3(2022)	4(2023)	5 (2024)	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	N/A	N/A	N/A	14.150.000	N/A	N/A	N/A	N/A	14.150.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Program:																	
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	N/A	N/A	N/A	5.340.200	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	5.340.200	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Kegiatan :																	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	N/A	N/A	N/A	5.340.200	N/A	N/A	N/A	N/A	5.340.200	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Sub Kegiatan:	N/A	N/A	N/A	5.340.200	N/A	N/A	N/A	N/A	5.340.200	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2020)	2(2021)	3(2022)	4(2023)	5 (2024)	1 (2020)	2(2021)	3(2022)	4(2023)	5 (2024)	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					N/A				00								
Program: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	N/A	N/A	N/A	58.358.800	N/A	N/A	N/A	N/A	58.358.800	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	N/A	N/A	N/A	58.358.800	N/A	N/A	N/A	N/A	58.358.800	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Sub Kegiatan: Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	N/A	N/A	N/A	53.157.400	N/A	N/A	N/A	N/A	53.157.400	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2020)	2(2021)	3(2022)	4(2023)	5 (2024)	1 (2020)	2(2021)	3(2022)	4(2023)	5 (2024)	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	N/A	N/A	N/A	5.201.400	N/A	N/A	N/A	N/A	5.201.400	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Program:																	
Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	N/A	N/A	N/A	5.460.000	N/A	N/A	N/A	N/A	5.460.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Kegiatan:																	
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	N/A	N/A	N/A	5.460.000	N/A	N/A	N/A	N/A	5.460.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Sub Kegiatan:																	
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	N/A	N/A	N/A	5.460.000	N/A	N/A	N/A	N/A	5.460.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2020)	2(2021)	3(2022)	4(2023)	5 (2024)	1 (2020)	2(2021)	3(2022)	4(2023)	5 (2024)	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																	
Program: Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	N/A	N/A	N/A	6.498.100	N/A	N/A	N/A	N/A	6.498.100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	N/A	N/A	N/A	6.498.100	N/A	N/A	N/A	N/A	6.498.100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Sub Kegiatan: Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	N/A	N/A	N/A	6.498.100	N/A	N/A	N/A	N/A	6.498.100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2020)	2(2021)	3(2022)	4(2023)	5 (2024)	1 (2020)	2(2021)	3(2022)	4(2023)	5 (2024)	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program: Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	N/A	N/A	N/A	43.120.100	N/A	N/A	N/A	N/A	43.120.100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	N/A	N/A	N/A	43.120.100	N/A	N/A	N/A	N/A	43.120.100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	N/A	N/A	N/A	43.120.100	N/A	N/A	N/A	N/A	43.120.100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
RENSTRA 2024-2026 RPD KABUPATEN JOMBANG 2024-2026																	
Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	N/A	N/A	N/A	N/A	3.012.572.307	N/A	N/A	N/A	N/A	2.739.866.972	N/A	N/A	N/A	N/A	90.93%	N/A	N/A
Kegiatan:	N/A	N/A	N/A	N/A	8.757.500	N/A	N/A	N/A	N/A	8.757.500	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2020)	2(2021)	3(2022)	4(2023)	5 (2024)	1 (2020)	2(2021)	3(2022)	4(2023)	5 (2024)	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										0							
Sub Kegiatan :																	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	8.217.500	N/A	N/A	N/A	N/A	8.217.500	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	N/A	N/A	N/A	N/A	540.000	N/A	N/A	N/A	N/A	540.000	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A
Kegiatan:					2.597.039.256					2.331.429.424					89.76%		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	2.597.039.256	N/A	N/A	N/A	N/A	2.331.429.424	N/A	N/A	N/A	N/A	89.76%	N/A	N/A
Sub Kegiatan :					2.521.711.256					2.256.101.424					89.46%		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	N/A	N/A	N/A	N/A	2.521.711.256	N/A	N/A	N/A	N/A	2.256.101.424	N/A	N/A	N/A	N/A	89.46%	N/A	N/A

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2020)	2(2021)	3(2022)	4(2023)	5 (2024)	1 (2020)	2(2021)	3(2022)	4(2023)	5 (2024)	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	N/A	N/A	N/A	N/A	75.128.000	N/A	N/A	N/A	N/A	75.128.000	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	N/A	N/A	N/A	N/A	200.000	N/A	N/A	N/A	N/A	200.000	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A
Kegiatan:	N/A	N/A	N/A	N/A	12.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	11.994.000	N/A	N/A	N/A	N/A	99.95%	N/A	N/A
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																	
Sub Kegiatan :	N/A	N/A	N/A	N/A	12.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	11.994.000	N/A	N/A	N/A	N/A	99.95%	N/A	N/A
Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya																	
Kegiatan:	N/A	N/A	N/A	N/A	102.689.100	N/A	N/A	N/A	N/A	96.124.760	N/A	N/A	N/A	N/A	93.6%	N/A	N/A

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2020)	2(2021)	3(2022)	4(2023)	5 (2024)	1 (2020)	2(2021)	3(2022)	4(2023)	5 (2024)	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Administrasi Umum Perangkat Daerah																	
Sub Kegiatan :																	
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	N/A	N/A	N/A	N/A	1.594.300	N/A	N/A	N/A	N/A	1.594.300	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	N/A	N/A	N/A	N/A	18.500.000	N/A	N/A	N/A	N/A	18.490.000	N/A	N/A	N/A	N/A	85.87%	N/A	N/A
Sub Kegiatan :																	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	N/A	N/A	N/A	N/A	8.718.800	N/A	N/A	N/A	N/A	8.718.800	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	N/A	N/A	N/A	N/A	2.400.000	N/A	N/A	N/A	N/A	2.400.000	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2020)	2(2021)	3(2022)	4(2023)	5 (2024)	1 (2020)	2(2021)	3(2022)	4(2023)	5 (2024)	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	N/A	N/A	N/A	N/A	46.200.000	N/A	N/A	N/A	N/A	39.670.000	N/A	N/A	N/A	N/A	85.87 %	N/A	N/A
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	N/A	N/A	N/A	N/A	25.276.000	N/A	N/A	N/A	N/A	25.241.660	N/A	N/A	N/A	N/A	99.86 %		
Kegiatan:																	
Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	88.919.749	N/A	N/A	N/A	N/A	88.660.750	N/A	N/A	N/A	N/A	99.71%	N/A	N/A
Sub Kegiatan :																	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	N/A	N/A	N/A	N/A	88.919.749	N/A	N/A	N/A	N/A	88.660.750	N/A	N/A	N/A	N/A	99.71%	N/A	N/A
Kegiatan:	N/A	N/A	N/A	N/A	103.784.552	N/A	N/A	N/A	N/A	103.576.138	N/A	N/A	N/A	N/A	99.8%	N/A	N/A

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2020)	2(2021)	3(2022)	4(2023)	5 (2024)	1 (2020)	2(2021)	3(2022)	4(2023)	5 (2024)	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
Sub Kegiatan:					31.632.552										99,84 %	N/A	N/A
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	31.575.251	N/A	N/A	N/A	N/A			
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	N/A	N/A	N/A	N/A	72.152.000	N/A	N/A	N/A	N/A	72.000.887	N/A	N/A	N/A	N/A	99,79 %	N/A	N/A
Kegiatan:																	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	99.382.150	N/A	N/A	N/A	N/A	99.324.400	N/A	N/A	N/A	N/A	99,64 %	N/A	N/A
Sub Kegiatan :	N/A	N/A	N/A	N/A	55.089.000	N/A	N/A	N/A	N/A	55.088.400	N/A	N/A	N/A	N/A	100%		

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2020)	2(2021)	3(2022)	4(2023)	5 (2024)	1 (2020)	2(2021)	3(2022)	4(2023)	5 (2024)	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan																	
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	N/A	N/A	N/A	N/A	27.343.150	N/A	N/A	N/A	N/A	27.286.000	N/A	N/A	N/A	N/A	99.79 %	N/A	N/A
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	N/A	N/A	N/A	N/A	16.950.000	N/A	N/A	N/A	N/A	16.950.000	N/A	N/A	N/A	N/A	98.23 %	N/A	N/A
Program:	N/A	N/A	N/A	N/A	9.022.000	N/A	N/A	N/A	N/A	9.022.000	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	N/A	N/A	N/A	N/A	9.022.000	N/A	N/A	N/A	N/A	9.022.000	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A
Kegiatan :	N/A	N/A	N/A	N/A	9.022.000	N/A	N/A	N/A	N/A	9.022.000	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2020)	2(2021)	3(2022)	4(2023)	5 (2024)	1 (2020)	2(2021)	3(2022)	4(2023)	5 (2024)	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan																	
Sub Kegiatan:																	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	N/A	N/A	N/A	N/A	9.022.000	N/A	N/A	N/A	N/A	9.022.000	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A
Program:																	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	N/A	N/A	N/A	N/A	86.292.400	N/A	N/A	N/A	N/A	86.292.400	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A
Kegiatan:	N/A	N/A	N/A	N/A	86.292.400	N/A	N/A	N/A	N/A	86.292.400	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2020)	2(2021)	3(2022)	4(2023)	5 (2024)	1 (2020)	2(2021)	3(2022)	4(2023)	5 (2024)	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah																	
Sub Kegiatan: Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	N/A	N/A	N/A	N/A	42.415.800	N/A	N/A	N/A	N/A	42.415.800	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	N/A	N/A	N/A	N/A	43.876.600	N/A	N/A	N/A	N/A	43.876.600	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A
Program:	N/A	N/A	N/A	N/A	9.800.000	N/A	N/A	N/A	N/A	9.800.000	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A
Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum																	
Kegiatan:	N/A	N/A	N/A	N/A	9.800.000	N/A	N/A	N/A	N/A	9.800.000	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A
Koordinasi Penerapan dan Penegakan																	

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2020)	2(2021)	3(2022)	4(2023)	5 (2024)	1 (2020)	2(2021)	3(2022)	4(2023)	5 (2024)	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																	
Sub Kegiatan:																	
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	N/A	N/A	N/A	N/A	9.800.000	N/A	N/A	N/A	N/A	9.800.000	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A
Program:																	
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	N/A	N/A	N/A	N/A	15.498.500	N/A	N/A	N/A	N/A	15.498.500	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A
Kegiatan :	N/A	N/A	N/A	N/A	15.498.500	N/A	N/A	N/A	N/A	15.498.500	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2020)	2(2021)	3(2022)	4(2023)	5 (2024)	1 (2020)	2(2021)	3(2022)	4(2023)	5 (2024)	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa																	
Sub Kegiatan:																	
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	N/A	N/A	N/A	N/A	15.498.500	N/A	N/A	N/A	N/A	15.498.500	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A
Program:																	
Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	N/A	N/A	N/A	N/A	43.978.200	N/A	N/A	N/A	N/A	43.978.200	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A
Kegiatan:																	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	N/A	N/A	N/A	N/A	43.978.200	N/A	N/A	N/A	N/A	43.978.200	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A
Sub Kegiatan:																	
	N/A	N/A	N/A	N/A	14.451.600	N/A	N/A	N/A	N/A	14.451.600	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2020)	2(2021)	3(2022)	4(2023)	5 (2024)	1 (2020)	2(2021)	3(2022)	4(2023)	5 (2024)	1	2	3	4	5	Angg aran	Realisas i
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	N/A	N/A	N/A	N/A	29.526.600	N/A	N/A	N/A	N/A	29.526.600	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A

Apabila ditarik rata-rata 5 (lima) tahun kebelakang, akuntabilitas kinerja Kecamatan Mojoagung berdasarkan Pengukuran Kinerja Keuangan mencapai angka 95% dan termasuk kategori "Sangat Memuaskan". Capaian kinerja ini dapat dijadikan proyeksi dari hasil pengukuran rasio realisasi mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dari masing-masing indikator kinerja per kegiatan dari masing-masing seksi/subbag pada Kecamatan Mojoagung.

Pada tahun 2020, sejumlah program menunjukkan capaian realisasi anggaran yang sangat tinggi, bahkan hampir sempurna. Beberapa di antaranya meliputi pelayanan administrasi perkantoran, penyediaan sarana dan prasarana gedung, pemeliharaan bangunan, serta penyusunan dokumen perencanaan, dengan tingkat realisasi mencapai 98% hingga 100%. Capaian ini mencerminkan bahwa proses penyusunan anggaran dilakukan secara realistis, dan pelaksanaannya dijalankan dengan disiplin serta sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Kondisi serupa juga terlihat kembali pada tahun 2024, di mana mayoritas program berhasil merealisasikan anggaran dengan sangat baik, antara 95% hingga 100%. Contohnya adalah penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah yang mencapai 100%, pengadaan barang milik daerah dan penyediaan jasa penunjang masing-masing sebesar 99%, serta pemeliharaan barang milik daerah yang juga terealisasi 99%. Hal ini mengindikasikan bahwa proses penganggaran dan pelaksanaan kegiatan telah terintegrasi secara baik, menunjukkan tingkat kematangan manajerial dalam tata kelola keuangan daerah.

Meski demikian, tidak semua periode menunjukkan performa serupa. Pada tahun 2021 dan 2022, terdapat sejumlah kegiatan yang mengalami penurunan kinerja anggaran. Misalnya, pada tahun 2021, kegiatan administrasi umum perangkat daerah

mengalami kontraksi anggaran yang cukup signifikan, termasuk sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor yang mengalami penurunan hingga -100%. Penurunan ini erat kaitannya dengan dampak sistemik pandemi COVID-19 yang melanda seluruh wilayah Indonesia, termasuk Kabupaten Jombang.

Selama tahun 2021 hingga sebagian besar tahun 2022, pemerintah daerah harus menyesuaikan kebijakan fiskal melalui mekanisme refocusing anggaran. Anggaran belanja yang semula dialokasikan untuk kegiatan rutin maupun pembangunan terpaksa dipotong dan dialihkan ke pos-pos darurat, seperti penanganan kesehatan, bantuan sosial, pemulihan ekonomi, dan penguatan ketahanan pangan. Akibatnya, berbagai kegiatan, terutama yang bersifat administratif, seremonial, pengadaan fisik berskala kecil, serta kegiatan tatap muka seperti rapat koordinasi dan bimtek, harus ditunda, dikurangi, atau bahkan dibatalkan sepenuhnya.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Kualitas Perencanaan Anggaran

Ketepatan dalam merumuskan rencana kegiatan dan anggaran sangat menentukan kelancaran pelaksanaan. Perencanaan yang tidak realistis atau tidak berbasis data akan berdampak pada penyerapan anggaran yang rendah atau pelaksanaan yang tidak optimal.

2. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

SDM yang memahami siklus anggaran, regulasi keuangan, serta penggunaan sistem (seperti SIPD) akan berpengaruh besar terhadap pengelolaan anggaran yang akuntabel. Kurangnya pelatihan dan pemahaman teknis dapat menyebabkan kesalahan administratif dan keterlambatan

pelaporan.

3. Sistem dan Prosedur Penganggaran

Sistem yang terlalu birokratis atau kurang fleksibel dapat menghambat proses pengajuan, pencairan, dan pelaksanaan anggaran. Sebaliknya, sistem yang terintegrasi dan transparan akan mempercepat pengambilan keputusan dan realisasi anggaran.

4. Pengawasan dan Monitoring

Pengawasan internal maupun eksternal (misalnya oleh Inspektorat, BPKP, atau BPK) berperan penting dalam mencegah penyimpangan dan memastikan pelaksanaan anggaran sesuai aturan. Monitoring yang intensif juga berkontribusi terhadap perbaikan kinerja secara berkala.

5. Kepemimpinan dan Komitmen Pimpinan

Kepemimpinan yang kuat, visioner, dan konsisten dalam pengelolaan anggaran akan mendorong seluruh jajaran untuk bekerja sesuai target dan regulasi. Komitmen pimpinan juga penting dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran.

6. Ketersediaan Data dan Informasi yang Akurat

Pengambilan keputusan anggaran sangat bergantung pada ketersediaan data yang lengkap, valid, dan terkini. Kinerja anggaran akan terhambat bila data yang digunakan dalam perencanaan dan evaluasi tidak akurat.

7. Partisipasi dan Koordinasi Antarunit

Keterlibatan seluruh unit kerja dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran sangat berpengaruh terhadap keselarasan program dan hasil yang dicapai. Koordinasi yang baik akan mencegah terjadinya tumpang tindih kegiatan dan mempercepat proses penganggaran.

8. Faktor Eksternal

Termasuk di dalamnya perubahan regulasi nasional, keterlambatan transfer dana dari pusat/daerah, atau kondisi luar biasa seperti bencana alam dan pandemi. Faktor ini dapat menghambat pelaksanaan kegiatan atau mengubah alokasi anggaran secara mendadak.

2.1.4 Kelompok sasaran layanan

Kelompok sasaran pelayanan di Kecamatan Mojoagung meliputi unsur pemerintahan desa, lembaga kewilayahan, serta masyarakat umum. Kecamatan berperan sebagai penghubung antara kebijakan pemerintah daerah dengan implementasi di tingkat desa. Pemerintah desa menjadi mitra utama dalam pembinaan penyelenggaraan pemerintahan, pendampingan perencanaan, dan pelayanan administrasi masyarakat. Di sisi lain, lembaga-lembaga lokal seperti BPD, LPMD, PKK, dan Karang Taruna juga menjadi sasaran dalam upaya penguatan kapasitas dan sinergi kelembagaan.

Masyarakat sebagai penerima manfaat utama memerlukan pelayanan administratif, penyampaian informasi kebijakan, serta fasilitasi dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, pelayanan kecamatan dituntut semakin responsif, merata, dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat.

Analisis terhadap dokumen perencanaan seperti Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jombang menunjukkan bahwa arah kebijakan lima tahun ke depan menekankan pelayanan publik berbasis digital, peningkatan kapasitas desa, dan tata kelola pemerintahan yang transparan. Hal ini menjadi peluang bagi Kecamatan Mojoagung untuk mengembangkan sistem pelayanan berbasis teknologi dan memperkuat peran koordinatifnya di wilayah kerja.

Selain itu, hasil kajian RTRW mengindikasikan bahwa Kecamatan Mojoagung akan tumbuh sebagai kawasan

permukiman dan ekonomi strategis, sehingga kebutuhan akan pelayanan dasar, perizinan, dan dukungan infrastruktur diperkirakan meningkat. Sementara itu, KLHS menunjukkan adanya tantangan lingkungan seperti banjir dan degradasi lahan yang menuntut layanan kecamatan agar lebih adaptif terhadap risiko bencana dan perubahan lingkungan.

Adapun lokasi pengembangan pelayanan diarahkan ke wilayah padat penduduk, desa-desa rawan bencana, serta kawasan yang menjadi sentra pertumbuhan ekonomi dan UMKM.

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Mojoagung Tahun 2025–2029, dilakukan serangkaian penelaahan dan kajian terhadap dokumen-dokumen perencanaan strategis tingkat nasional maupun daerah. Penelaahan ini bertujuan untuk menjamin keselarasan arah kebijakan Kecamatan Mojoagung dengan prioritas pembangunan nasional dan daerah, sehingga pelayanan publik yang dilaksanakan dapat terintegrasi secara sistematis, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Hasil kajian terhadap Renstra Kementerian Dalam Negeri periode 2025–2029 menunjukkan bahwa pemerintah pusat menekankan pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang adaptif, efisien, dan berbasis data. Pemerintah kecamatan, sebagai entitas pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, diharapkan dapat memainkan peran sebagai ujung tombak pelayanan publik yang cepat, sederhana, dan responsif. Fokus penguatan pelayanan publik digital, birokrasi yang berbasis hasil (outcome), serta peningkatan kapasitas wilayah menjadi kerangka dasar yang relevan untuk diadopsi dalam Renstra Kecamatan Mojoagung.

Selanjutnya, arah kebijakan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) memberikan penekanan pada penguatan kapasitas desa

dan pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal. Bagi Kecamatan Mojoagung, yang memiliki sejumlah desa dengan karakteristik sosial-ekonomi beragam, hal ini menjadi peluang untuk memperkuat peran pembinaan pemerintahan desa, fasilitasi perencanaan pembangunan berbasis masyarakat, serta peningkatan sinergi dalam pengelolaan dana desa.

Analisis terhadap Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jombang juga menunjukkan keterkaitan langsung antara program strategis perangkat daerah dengan peran dan fungsi pelayanan kecamatan. Bappeda Kabupaten Jombang, misalnya, mendorong pengembangan sistem perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, inklusif, dan berbasis data spasial. Dalam konteks ini, Kecamatan Mojoagung bertindak sebagai pelaksana teknis yang menjangkau desa-desa dalam rangka pengumpulan data perencanaan, validasi program, serta fasilitasi forum musyawarah pembangunan desa dan kecamatan.

Sementara itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Jombang dalam rencana strategisnya menekankan pada penguatan kelembagaan masyarakat desa dan percepatan transformasi digital dalam pelayanan publik. Hal ini selaras dengan peran kecamatan dalam melakukan pembinaan terhadap lembaga desa seperti BPD, LPMD, dan PKK, termasuk penyelesaian masalah antarwilayah desa serta pelatihan teknis aparatur desa.

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Jombang memfokuskan diri pada transformasi layanan kependudukan yang berbasis digital dan terintegrasi. Dalam hal ini, Kecamatan Mojoagung melalui layanan PATEN berfungsi sebagai perpanjangan tangan dalam memberikan layanan dokumen administrasi kependudukan seperti KTP, KK, dan akta kelahiran. Peningkatan kapasitas sistem layanan PATEN

menjadi kebutuhan mendesak agar pelayanan tetap prima dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Di sisi lain, peran Kecamatan Mojoagung dalam menjaga stabilitas wilayah juga diperkuat oleh arahan Renstra Satpol PP Kabupaten Jombang. Kecamatan diharapkan menjadi simpul koordinatif dalam menjaga ketertiban umum, memfasilitasi deteksi dini terhadap konflik sosial, serta membangun kemitraan keamanan dengan Forkopimcam (Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan), TNI, Polri, dan tokoh masyarakat setempat.

Dari keseluruhan penelaahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran Kecamatan Mojoagung dalam lima tahun mendatang akan semakin strategis. Bukan hanya sebagai perantara administratif, melainkan juga sebagai aktor kunci dalam mendorong pelayanan publik berbasis masyarakat, fasilitator reformasi birokrasi tingkat wilayah, serta koordinator pembangunan lokal yang berbasis data dan kolaborasi lintas sektor. Renstra Kecamatan Mojoagung 2025–2029 diharapkan mampu menjawab tantangan ini dengan inovasi, responsivitas, dan kepemimpinan yang transformatif.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap dokumen Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) serta Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jombang, dapat disimpulkan bahwa tantangan yang akan dihadapi oleh Kecamatan Mojoagung dalam lima tahun ke depan semakin beragam dan kompleks. Kecamatan tidak lagi hanya diposisikan sebagai perantara administratif antara desa dan pemerintah kabupaten, melainkan bertransformasi menjadi penggerak pelayanan berbasis masyarakat, pelaksana reformasi birokrasi tingkat lokal, sekaligus koordinator pembangunan kewilayahan yang terintegrasi.

Di sisi lain, peluang untuk penguatan peran kecamatan juga semakin terbuka. Beberapa peluang strategis yang dapat

dimanfaatkan oleh Kecamatan Mojoagung di antaranya adalah:

1. Dukungan pengembangan sistem layanan publik berbasis digital di tingkat kecamatan,
2. Integrasi dengan sistem informasi kependudukan daerah,
3. Sinkronisasi program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan desa dan lintas sektor,
4. Perluasan ruang partisipasi masyarakat melalui forum musyawarah pembangunan kecamatan.

Dengan memahami secara menyeluruh arah kebijakan dari dokumen Renstra nasional dan daerah, Kecamatan Mojoagung memiliki peluang untuk membangun strategi pelayanan yang lebih adaptif, kontekstual, dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional serta kebutuhan riil masyarakat.

Mengacu pada RTRW Kabupaten Jombang Tahun 2021–2041, Kecamatan Mojoagung termasuk dalam kawasan strategis yang diarahkan sebagai pusat pertumbuhan kawasan selatan dan penyangga wilayah permukiman serta kegiatan ekonomi. Kawasan ini dilintasi oleh jalur distribusi logistik dan terhubung dengan pusat-pusat kegiatan pertanian serta industri rumah tangga, sehingga menjadikan Mojoagung memiliki posisi penting dalam mendukung konektivitas antarwilayah dan penguatan pelayanan publik, khususnya di bidang agribisnis, UMKM, dan layanan dasar masyarakat.

Namun, dinamika penggunaan ruang yang berkembang cepat seperti alih fungsi lahan dari pertanian ke permukiman dan kegiatan komersial menimbulkan tantangan tersendiri, terutama dalam penataan pelayanan dan pengelolaan ruang. Desa-desa seperti Miagan, Gambiran, dan Tanggalrejo mengalami percepatan pertumbuhan penduduk dan perluasan permukiman, yang berdampak langsung terhadap meningkatnya kebutuhan layanan administrasi kependudukan, koordinasi pembangunan fisik, serta

penguatan pengawasan sosial di tingkat desa.

Analisis terhadap dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Jombang 2025–2029 menunjukkan bahwa salah satu isu utama yang harus direspon adalah pengelolaan lingkungan hidup, terutama dalam hal persampahan, pencemaran air, dan degradasi kualitas lingkungan akibat aktivitas domestik dan industrialisasi. Penurunan kualitas air sungai yang menjadi sumber air baku, serta ketimpangan akses terhadap layanan dasar di wilayah yang sedang mengalami transformasi spasial, menjadi tantangan yang tidak bisa diabaikan.

KLHS juga menekankan pentingnya keadilan spasial dan penguatan kelembagaan lokal dalam menjaga kelestarian lingkungan dan stabilitas sosial. Dalam konteks ini, peran Kecamatan Mojoagung sangat penting sebagai simpul koordinasi pembangunan dan pelayanan lintas desa, termasuk dalam upaya mitigasi bencana lokal, mediasi konflik, dan edukasi lingkungan berbasis masyarakat.

Dengan mempertimbangkan perkembangan wilayah dan masukan dari dokumen perencanaan tersebut, maka jenis pelayanan yang perlu diperkuat oleh Kecamatan Mojoagung mencakup:

1. Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, seperti pembuatan KTP, KK, surat pindah, dan dokumen lainnya;
2. Fasilitasi pembangunan desa, termasuk pembinaan kelembagaan, pendampingan musyawarah desa, serta pengawasan kegiatan fisik;
3. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum, terutama dalam menangani potensi konflik sosial, pengawasan kegiatan masyarakat, serta koordinasi dengan aparat keamanan;

4. Koordinasi pembangunan antar sektor, melalui forum Forkopimcam, monitoring kegiatan OPD, dan fasilitasi program lintas instansi;
5. Pelayanan lingkungan dan penanggulangan bencana, berupa sosialisasi kesiapsiagaan bencana, edukasi pengelolaan sampah, dan pemantauan dampak pembangunan.

Diperkirakan, permintaan terhadap berbagai jenis layanan tersebut akan terus meningkat dengan pertumbuhan tahunan antara 10–15%, sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk, kegiatan ekonomi, dan perluasan permukiman.

Adapun lokasi prioritas pengembangan pelayanan difokuskan pada:

- Desa dengan kepadatan penduduk tinggi, seperti Mojotrisno, Janti, dan Karangwinongan;
- Wilayah perbatasan yang masih memiliki keterbatasan akses, seperti Desa Kedunglumpang, Seketi, dan Karobelah;
- Zona rawan konflik atau tekanan lingkungan, termasuk desa yang mengalami perubahan tata guna lahan cepat;
- Zona ekonomi baru, yang membutuhkan layanan cepat dan koordinasi antarinstansi secara intensif.

Berdasarkan hasil telaahan terhadap RTRW dan KLHS, Kecamatan Mojoagung perlu menyusun strategi pelayanan publik yang lebih berbasis spasial, partisipatif, dan responsif terhadap dinamika sosial-lingkungan. Pelayanan publik tidak hanya harus menjangkau secara menyeluruh, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan wilayah yang berkelanjutan, inklusif, dan tangguh menghadapi tantangan ke depan.

2.1.4.1 Mitra Perangkat Daerah

Dalam menjalankan fungsi pelayanan dan pengelolaan pemerintahan wilayah, Kecamatan Mojoagung tidak bertindak secara terpisah, melainkan membangun kerja sama yang sinergis dengan berbagai mitra strategis. Kemitraan ini melibatkan instansi teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang, lembaga vertikal, pemerintah desa, hingga elemen masyarakat sipil. Bentuk kerja sama tersebut mencerminkan semangat kolaborasi antar sektor untuk memastikan pelayanan publik yang efektif dan menyentuh kebutuhan masyarakat secara luas.

Beberapa perangkat daerah yang menjadi mitra utama Kecamatan Mojoagung mencakup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil), Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Bentuk kolaborasi dilakukan melalui penyusunan dan pelaksanaan program lintas sektor, seperti fasilitasi musrenbang, pendampingan pemerintahan desa, layanan administrasi kependudukan, edukasi kesehatan masyarakat, pembinaan wawasan kebangsaan, Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN), serta koordinasi penanganan ketertiban umum dan bencana.

Bappeda berperan dalam menyelaraskan arah kebijakan pembangunan kecamatan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD dan RKPD Kabupaten. Fasilitasi dan pendampingan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan tahunan, seperti Rencana Kerja (Renja) Kecamatan, agar sejalan dengan tema dan prioritas pembangunan daerah. Penyelarasan usulan program dan kegiatan kecamatan dalam forum Musrenbang Kecamatan, serta proses pengusulan melalui sistem SIPD, sehingga aspirasi

kewilayahan dapat masuk dalam rencana pembangunan kabupaten secara terstruktur dan terintegrasi. Koordinasi dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja kecamatan, baik yang bersifat administratif maupun substantif, sebagai bagian dari sistem evaluasi pembangunan daerah.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Jombang merupakan mitra utama Kecamatan Mojoagung dalam pelaksanaan fungsi fasilitasi pemerintahan desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat. Mengingat kecamatan memiliki peran sebagai pembina dan pengawas umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, maka koordinasi dengan DPMD menjadi krusial untuk memastikan tata kelola desa berjalan sesuai regulasi dan mendukung pencapaian pembangunan daerah. Bentuk peran dan kemitraan DPMD dalam mendukung kinerja Kecamatan Mojoagung antara lain Pendampingan teknis dan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk pelaksanaan musyawarah desa, pembinaan perangkat desa, dan penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa. Koordinasi dalam perencanaan dan pelaporan pembangunan desa, agar selaras dengan RPJMDes, RKPDDes, dan APBDes, serta mendukung sinergi dengan program-program kewilayahan dan kabupaten. Pembinaan dan evaluasi kinerja aparatur desa secara berkala, termasuk dalam aspek penyusunan laporan, pemenuhan standar pelayanan minimal, dan pemanfaatan dana desa secara akuntabel. Fasilitasi program pemberdayaan masyarakat, seperti penguatan ekonomi lokal, pelatihan kelompok usaha masyarakat, dan pengembangan inovasi desa. Kolaborasi dalam pelaksanaan kegiatan prioritas seperti peningkatan status IDM (Indeks Desa Membangun) dan pencegahan stunting melalui intervensi berbasis desa.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil)

Kabupaten Jombang merupakan mitra teknis Kecamatan Mojoagung dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di tingkat wilayah. Pelayanan administrasi kependudukan yang cepat, akurat, dan mudah diakses menjadi bagian penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang responsif serta pelayanan publik yang berkualitas. Dalam hal ini, Kecamatan Mojoagung menjalankan fungsi sebagai perpanjangan tangan Dispendukcapil dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat di wilayahnya, khususnya dalam proses pencatatan sipil dan pengurusan dokumen kependudukan.

Adapun bentuk kolaborasi dan kemitraan antara Kecamatan Mojoagung dan Dispendukcapil meliputi:

- a. Fasilitasi layanan administrasi kependudukan, seperti pengurusan Kartu Keluarga (KK), KTP-el, Akta Kelahiran, dan Akta Kematian, melalui loket pelayanan kecamatan atau kegiatan jemput bola.
- b. Dukungan terhadap program pelayanan inovatif Dispendukcapil, seperti layanan keliling, pelayanan terpadu, dan pelayanan berbasis digital (online).
- c. Koordinasi dalam pemutakhiran data kependudukan, yang digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan wilayah, pelayanan publik, dan penyaluran bantuan sosial.
- d. Peningkatan literasi administrasi kependudukan bagi masyarakat, melalui sosialisasi hak dan kewajiban administrasi kependudukan bersama desa dan tokoh masyarakat.
- e. Pelaporan dan penanganan kasus-kasus khusus, seperti data ganda, warga rentan administrasi, atau perpindahan penduduk antardaerah.

Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang merupakan mitra kerja penting Kecamatan Mojoagung dalam upaya peningkatan

derajat kesehatan masyarakat di tingkat wilayah. Sebagai perangkat daerah yang membidangi urusan kesehatan, Dinas Kesehatan berperan dalam menyediakan layanan kesehatan dasar, pengendalian penyakit, pembinaan fasilitas kesehatan, serta penguatan promosi kesehatan masyarakat. Dengan adanya kerja sama yang erat antara Kecamatan Mojoagung dan Dinas Kesehatan, berbagai program pembangunan kesehatan dapat berjalan lebih terarah, berkelanjutan, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Kolaborasi ini juga memperkuat posisi kecamatan sebagai simpul koordinasi antar pemangku kepentingan dalam rangka menciptakan masyarakat yang sehat, produktif, dan sejahtera.

Dinas Sosial Kabupaten Jombang merupakan mitra kerja strategis Kecamatan Mojoagung dalam penanganan isu-isu kesejahteraan sosial dan perlindungan masyarakat rentan. Dalam konteks pelaksanaan urusan pemerintahan umum di tingkat wilayah, Kecamatan Mojoagung memiliki peran fasilitatif dan koordinatif terhadap program-program bantuan sosial, pemberdayaan kelompok rentan, dan penanganan masalah sosial yang memerlukan keterlibatan lintas sektor. Adapun bentuk kemitraan antara Kecamatan Mojoagung dan Dinas Sosial meliputi Fasilitasi penyaluran bantuan sosial, Pendataan dan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Penanganan kasus sosial, Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, Koordinasi dalam penanganan bencana alam dan non-alam, Peningkatan partisipasi sosial masyarakat.

Bakesbangpol merupakan mitra strategis kecamatan dalam menjaga stabilitas wilayah, memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa, serta membangun partisipasi aktif masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Beberapa bentuk kolaborasi antara Kecamatan Mojoagung dan Bakesbangpol antara

lain Koordinasi kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dalam rangka deteksi dan pencegahan potensi gangguan sosial, politik, maupun konflik horizontal di tingkat desa dan kecamatan. Pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, baik melalui pelatihan kader, sosialisasi nilai-nilai kebhinekaan, maupun pendidikan politik masyarakat. Penyelenggaraan peringatan hari besar nasional (PHBN) seperti HUT Kemerdekaan RI yang dilaksanakan bersama pemerintah desa dan elemen masyarakat. Penguatan koordinasi dalam menjaga kondusivitas wilayah menjelang dan selama pelaksanaan pemilu maupun kegiatan politik lainnya, termasuk fasilitasi komunikasi antar tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Jombang merupakan mitra strategis Kecamatan Mojoagung dalam rangka menjaga ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) di tingkat kewilayahan. Mengingat kecamatan memiliki fungsi koordinatif dalam pemerintahan umum dan pelayanan publik, sinergi dengan Satpol PP menjadi penting untuk menciptakan lingkungan sosial yang tertib, aman, dan kondusif.

Selain perangkat daerah, Kecamatan Mojoagung juga menjalin kerja sama erat dengan lembaga vertikal yang tergabung dalam Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), seperti Polsek Mojoagung, Koramil, Puskesmas, serta Kantor Urusan Agama (KUA). Lembaga-lembaga ini menjadi mitra penting dalam menjaga stabilitas wilayah, memberikan pelayanan dasar seperti kesehatan dan pembinaan keluarga, serta menangani dinamika sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Peran Polsek dan Koramil sangat signifikan dalam mengantisipasi gangguan ketertiban dan keamanan, sementara Puskesmas

menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan di tingkat kecamatan.

Pemerintah desa juga menjadi mitra fungsional Kecamatan Mojoagung. Terdapat 18 desa di wilayah ini yang bekerja sama dengan kecamatan dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan. Kolaborasi ini mencakup pelaksanaan musyawarah pembangunan desa dan kecamatan, asistensi penyusunan dan evaluasi APBDes, pendampingan terhadap regulasi desa seperti Perdes, hingga koordinasi kegiatan lintas wilayah. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) turut menguatkan hubungan koordinatif ini, terutama dalam memastikan jalannya pemerintahan desa yang partisipatif dan akuntabel.

Kemitraan juga diperluas hingga pada unsur masyarakat sipil, seperti organisasi kepemudaan, kelompok keagamaan, LPM, Karang Taruna, PKK, serta jaringan RT/RW. Keterlibatan mereka sangat vital dalam menyukseskan agenda sosial kemasyarakatan, menggerakkan partisipasi publik, serta menjadi perantara yang efektif dalam menyampaikan kebutuhan warga kepada pemerintah.

Dengan dukungan dan koordinasi yang solid dari seluruh mitra tersebut, Kecamatan Mojoagung mampu mengoptimalkan perannya sebagai simpul pelayanan kewilayahan. Kolaborasi yang harmonis menjadi kunci tercapainya pelayanan yang inklusif, responsif, dan adaptif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan yang terus berkembang.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Perubahan kebijakan kelembagaan daerah pasca-ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, serta pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (SPPN), telah menegaskan bahwa kecamatan merupakan unit kerja perangkat daerah yang memiliki kewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan secara komprehensif. Proses perencanaan tersebut harus mengakomodasi berbagai pendekatan, seperti pendekatan politis, teknokratis, partisipatif, serta mengintegrasikan alur dari bawah ke atas (bottom-up) dan dari atas ke bawah (top-down).

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Mojoagung dalam kurun waktu lima tahun terakhir, serta dengan memperhatikan dinamika kebijakan, perubahan sosial, dan tuntutan pelayanan masyarakat, terdapat sejumlah persoalan strategis yang perlu menjadi perhatian utama dalam penyusunan arah kebijakan ke depan. Beberapa isu dan permasalahan tersebut meliputi:

Tabel 2.9
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Keterbatasan Kapasitas Aparatur Desa	Masih rendahnya pemahaman aparat desa terhadap manajemen pemerintahan dan pengelolaan administrasi secara profesional.	Kurangnya akses pelatihan, pendampingan teknis, serta pembinaan reguler dari kecamatan maupun dinas terkait.
2.	Rendahnya Kualitas dan Jumlah SDM Kecamatan	Aparatur kecamatan belum sepenuhnya memiliki kompetensi yang memadai dan masih terbatas secara jumlah dalam menghadapi kompleksitas urusan pelayanan.	Belum maksimalnya program peningkatan kompetensi dan minimnya regenerasi SDM melalui rekrutmen berbasis kebutuhan.
3.	Minimnya Sarana dan Prasarana Kantor.	Ketersediaan fasilitas kantor seperti peralatan, kendaraan operasional, dan ruang pelayanan belum mendukung	Keterbatasan anggaran belanja modal dan kurangnya prioritas pembaruan sarana dalam perencanaan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
		efisiensi kerja aparatur.	tahunan.
4.	Kualitas Layanan Publik Belum Memenuhi Harapan	Meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap layanan cepat dan transparan belum dapat sepenuhnya dipenuhi oleh kecamatan.	Inovasi pelayanan belum berkembang, tenaga pelayanan terbatas, serta rendahnya penggunaan teknologi informasi.
5.	Tidak Adanya Sistem Informasi Wilayah Terpadu	Belum ada sistem informasi yang mengintegrasikan data antara kecamatan dan desa secara real-time dan berkelanjutan.	Kurangnya platform digital bersama, minimnya infrastruktur jaringan, dan belum adanya regulasi integrasi data.
6.	Lemahnya Pemberdayaan Lembaga Desa	Banyak lembaga desa seperti BUMDes atau LPMD yang belum berjalan optimal dan tidak memberikan dampak nyata dalam pembangunan desa.	Belum aktifnya peran kecamatan dalam fasilitasi, serta minimnya kolaborasi program pemberdayaan antar dinas.
7.	Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemerintahan desa	Tingkat partisipasi masyarakat dalam ikut mengawasi maupun berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan kegiatan pembangunan masih cukup rendah.	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya keterlibatan mereka dalam pembangunan. Rendahnya literasi perencanaan dan akses informasi program desa. Budaya pasif dan sikap apatis akibat minimnya pengalaman dilibatkan secara bermakna.

2.2.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Kecamatan Mojoagung merupakan salah satu unsur pelaksana pemerintahan daerah yang memegang mandat untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan umum yang didelegasikan oleh Bupati. Tugas-tugas yang dijalankan meliputi pelayanan administrasi publik, koordinasi antarinstansi di wilayah, pemeliharaan ketertiban umum, hingga fungsi pembinaan

terhadap desa-desa yang berada di bawah wilayah kerjanya.

Dalam perencanaan strategis, Kecamatan Mojoagung merujuk dan sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten. Secara nasional, arah pembangunan Indonesia tahun 2025–2029 didasarkan pada visi Presiden Republik Indonesia terpilih untuk periode tersebut, yakni:

“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Visi tersebut menegaskan pentingnya pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan dalam rangka menyiapkan fondasi kuat menuju 100 tahun Indonesia merdeka. Visi tersebut dijabarkan ke dalam 8 misi pembangunan nasional yang dikenal dengan Asta Cita, yaitu:

1. Memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia.
2. Memperkokoh sistem pertahanan keamanan negara dan meningkatkan kepemimpinan global Indonesia.
3. Mewujudkan pemerataan pembangunan.
4. Mempercepat pembangunan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan dan berbasis pengetahuan.
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan penguasaan IPTEK.
6. Memperkuat reformasi birokrasi, supremasi hukum dan pelayanan publik.
7. Memperkuat budaya, memperkokoh toleransi, dan memperkuat kesejahteraan sosial.
8. Mempercepat transformasi digital, energi, dan ekonomi hijau.

Dalam kaitannya dengan RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2025–2029, keberadaan Kecamatan Mojoagung menjadi bagian penting dalam mendukung pencapaian visi Kepala daerah terpilih, yaitu: **“Mewujudkan Jombang Maju dan Sejahtera**

untuk Semua.” Secara lebih khusus, peran Kecamatan Mojoagung sangat erat kaitannya dengan Misi ke-5 Kepala Daerah, yakni **“Menghadirkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka dan Kolaboratif.”** Transformasi tata kelola pemerintahan ini diselenggarakan melalui transformasi digital dan perluasan partisipasi publik.

Implementasi dari misi tersebut tercermin dalam berbagai bentuk kegiatan strategis yang dilaksanakan kecamatan, antara lain:

1. Penguatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sebagai ujung tombak layanan publik yang dituntut makin profesional, cepat, dan mudah diakses oleh masyarakat.
2. Penyelenggaraan forum perencanaan partisipatif, seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan Kecamatan (Musrenbang), yang menjadi sarana utama dalam menjaring aspirasi dan prioritas warga secara inklusif.
3. Fungsi koordinatif melalui Forkopimcam, yang memungkinkan sinergi antara unsur TNI, Polri, dan perangkat daerah dalam merespons persoalan kewilayahan secara terstruktur.
4. Pembinaan terhadap aparatur dan lembaga desa, termasuk fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, serta pendampingan lembaga kemasyarakatan seperti BPD, LPM, Karang Taruna, dan RT/RW.
5. Penyebaran informasi serta fasilitasi pengaduan masyarakat, sebagai perwujudan dari prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan yang terbuka.

Peran kecamatan sebagai simpul koordinasi lintas desa menjadikan Kecamatan Mojoagung sebagai aktor penting dalam penyelenggaraan birokrasi yang efektif, responsif, dan inklusif hingga pada level masyarakat paling bawah.

Dalam pelaksanaan misi tersebut, terdapat sejumlah faktor

pendukung yang memperkuat kinerja kecamatan, serta beberapa tantangan struktural yang perlu diantisipasi:

Tabel 2.10

Kesesuaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2025-2029 dengan Tujuan dan Sasaran serta Faktor Penghambat dan Pendukung pada Kecamatan Mojoagung

Visi : Mewujudkan Jombang Maju dan Sejahtera untuk Semua			
Misi : Menghadirkan transformasi tata kelola pemerintahan yang terbuka dan kolaboratif			
Tujuan	Sasaran	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan di tingkat kecamatan	1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ego sektoral antar instansi Rendahnya kolaborasi karena masing-masing pihak berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi. 2. Terbatasnya kewenangan teknis kecamatan. Kewenangan kecamatan yang terbatas membuat sinergi hanya bersifat fasilitatif, bukan eksekutorial. 3. Ketidakterbukaan informasi dari mitra kerja. Kurangnya akses data dan informasi dari OPD atau desa menyebabkan miskomunikasi atau ketidaksinkronan program. 4. Kurangnya SDM yang kompeten di bidang fasilitasi dan koordinasi. Aparatur kecamatan belum seluruhnya memahami peran koordinatif secara strategis. 5. Minimnya anggaran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen Pimpinan Kecamatan dan Forkopimcam. Mendorong koordinasi lintas sektor dan pengambilan keputusan kolektif yang responsif. 2. Kebijakan Pemerintah Daerah yang mendukung peran kecamatan. Adanya regulasi atau pelimpahan kewenangan yang memungkinkan kecamatan menjalankan fungsi koordinatif secara optimal. 3. Hubungan baik dengan pemerintah desa dan lembaga masyarakat maupun mitra OPD. Mempermudah konsolidasi kegiatan dan penyampaian informasi program kewilayahan. 4. Ketersediaan forum komunikasi dan koordinasi rutin. Seperti Musrenbang, pertemuan Linsek, atau pertemuan berkala yang memperkuat sinergi lintas pihak. 5. Dukungan teknologi informasi.

		operasional pendukung koordinasi. Kegiatan sinergi membutuhkan dukungan logistik, pelaporan, dan pertemuan rutin yang tidak selalu teranggarkan.	Memungkinkan komunikasi yang cepat, data sharing, dan sistem pelaporan terintegrasi antar sektor.
	6. Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman yang masih terbatas terhadap konsep kinerja. Banyak aparatur masih fokus pada rutinitas, bukan pada output dan outcome. 2. Keterbatasan SDM dalam penyusunan laporan kinerja. Belum merata kemampuan menyusun IKU, IKI, dan pelaporan evaluatif berbasis hasil. 3. Sikap administratif yang pasif. Laporan disusun sekadar menggugurkan kewajiban, tanpa refleksi kinerja riil. 4. Sistem pelaporan belum terintegrasi dan tumpang tindih. Banyak aplikasi dan sistem yang berjalan sendiri-sendiri, menyulitkan koordinasi data. 5. Minimnya budaya kerja berbasis kinerja. Target kerja belum selalu dijadikan tolok ukur keberhasilan, masih dominan pendekatan prosedural. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Mendorong perencanaan berbasis kinerja dan pengukuran capaian secara sistematis. 2. Komitmen pimpinan terhadap kinerja dan transparansi. Menjadi contoh bagi seluruh jajaran dalam menerapkan tata kelola yang akuntabel. 3. Dukungan regulasi dan kebijakan evaluatif. Adanya pedoman dan instrumen pengukuran kinerja dari KemenPAN-RB, Bagian Organisasi, dan Inspektorat. 4. Peningkatan kompetensi aparatur. Melalui pelatihan, Bimtek, dan penguatan SDM dalam perencanaan, pelaporan, dan evaluasi. 5. Pemanfaatan teknologi informasi. Sistem pelaporan dan monitoring elektronik (e-SAKIP, SIPD, e-Monev, E-kinerja) mempercepat proses dan akurasi data.

Melalui pemetaan terhadap faktor-faktor tersebut, Kecamatan Mojoagung diharapkan mampu menyusun langkah-langkah strategis dalam mendukung terciptanya pemerintahan yang terbuka, kolaboratif, dan mampu menjawab tantangan pembangunan wilayah secara dinamis. Pendekatan partisipatif dan peningkatan kapasitas lokal menjadi kunci dalam memperkuat pelayanan publik serta mempercepat terwujudnya tata kelola yang adaptif di masa mendatang.

2.2.2 Telaahan Rencana tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Berdasarkan dokumen RTRW Kabupaten Jombang Tahun 2021–2041, Kecamatan Mojoagung diarahkan sebagai salah satu kawasan strategis dengan fungsi ganda, yaitu sebagai penyangga kawasan agropolitan dan simpul distribusi wilayah tengah kabupaten. Letak geografisnya yang berada di jalur penghubung antar kecamatan dan kedekatannya dengan pusat kota menjadikan Mojoagung sebagai wilayah potensial dalam mendukung konektivitas antarwilayah, pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru, dan percepatan pemerataan pelayanan publik.

Sebagian wilayah Mojoagung menunjukkan perkembangan pemukiman yang pesat, khususnya di desa-desa seperti Mancilan, Gambiran, dan Janti, yang mengalami alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan dan kegiatan komersial. Kondisi ini mencerminkan dinamika perubahan tata guna lahan yang berdampak langsung terhadap kebutuhan layanan administrasi kependudukan, pengawasan pembangunan, serta pengendalian tata ruang yang lebih ketat.

Kecamatan Mojoagung merupakan salah satu wilayah strategis di Kabupaten Jombang yang tidak hanya berperan

sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis perdagangan dan jasa, tetapi juga memiliki kekayaan budaya dan potensi wisata religi yang signifikan, salah satunya adalah kompleks makam Mbah Sayid Sulaiman. Situs ini menjadi salah satu tujuan ziarah yang banyak dikunjungi oleh masyarakat dari berbagai daerah, terutama pada waktu-waktu tertentu dalam kalender keagamaan.

Dalam konteks penataan ruang wilayah (RTRW), keberadaan kawasan wisata religi ini perlu mendapatkan perhatian sebagai zona yang memiliki nilai historis, sosial, dan ekonomi. Pengelolaan ruang di sekitar situs perlu diarahkan untuk mendukung kegiatan pariwisata berbasis budaya dan spiritual tanpa mengganggu keseimbangan lingkungan dan aktivitas permukiman warga.

Sementara itu, hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam dokumen Ranwal RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2025–2029 menyoroti pentingnya pengelolaan lingkungan secara terpadu, terutama dalam konteks meningkatnya limbah rumah tangga, pencemaran air akibat aktivitas domestik dan usaha kecil, serta ketidakseimbangan antara ruang hijau dan kawasan terbangun. Beberapa desa di Mojoagung, seperti Kedunglumpang dan Tanggalrejo, teridentifikasi sebagai wilayah dengan kerentanan tinggi terhadap degradasi lingkungan dan perubahan iklim, terutama saat musim penghujan.

Telaahan terhadap dua dokumen strategis tersebut mengungkap bahwa Kecamatan Mojoagung perlu mengembangkan pendekatan layanan yang tidak hanya responsif terhadap kebutuhan sosial-ekonomi, tetapi juga proaktif dalam menghadapi tantangan ekologis dan tata ruang yang dinamis.

Faktor Pendorong Kecamatan Mojoagung

- Posisi strategis wilayah yang berada pada jalur utama penghubung kabupaten dan dekat dengan kawasan industri

serta kota, membuka peluang pengembangan ekonomi dan pelayanan terpadu.

- Perkembangan infrastruktur transportasi dan konektivitas digital yang memungkinkan distribusi layanan publik yang lebih merata ke seluruh desa.
- Potensi kolaborasi program lingkungan dan perencanaan ruang dengan perangkat daerah teknis dan mitra pembangunan (Dinas Lingkungan Hidup, Bappeda, BPBD).
- Tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan, terutama dalam pengelolaan sampah berbasis warga dan kegiatan penghijauan.

Faktor Penghambat Kecamatan Mojoagung

- Alih fungsi lahan yang tidak terkendali menyebabkan tekanan terhadap ruang terbuka hijau dan kawasan pertanian produktif.
- Belum optimalnya penegakan regulasi tata ruang pada tingkat desa dan lemahnya koordinasi antarwilayah dalam pengendalian pembangunan.
- Minimnya data spasial dan informasi lingkungan yang terintegrasi antara kecamatan dan perangkat desa, sehingga menyulitkan pemetaan kebutuhan pelayanan.
- Terbatasnya sumber daya dalam pengelolaan isu lingkungan, baik dari sisi personel, anggaran, maupun sarana prasarana pendukung seperti alat monitoring kualitas lingkungan.

Dengan mempertimbangkan hasil telaahan RTRW dan KLHS, Kecamatan Mojoagung perlu menyusun strategi pembangunan wilayah yang lebih terarah dan berwawasan lingkungan. Fokus pada pengendalian tata ruang, pelayanan publik berbasis spasial, dan penguatan kolaborasi antarinstansi menjadi kunci dalam menjawab tantangan pelayanan ke depan.

2.2.3 Isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan pokok atau tantangan utama yang memiliki pengaruh besar terhadap pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, serta perlu ditangani secara prioritas. Isu ini biasanya bersifat mendasar, meluas dampaknya, dan berlangsung secara berkelanjutan, sehingga memerlukan perhatian serius dan pendekatan yang terencana dari pihak pemerintah daerah.

Dalam lingkup kecamatan, isu strategis merujuk pada berbagai hambatan atau kebutuhan penting yang muncul dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pengelolaan wilayah, maupun koordinasi pemerintahan desa. Isu-isu ini sering kali berkaitan langsung dengan kebijakan nasional dan daerah, serta memiliki keterkaitan lintas sektor, sehingga penanganannya tidak dapat dilakukan secara parsial.

Penetapan isu strategis dilakukan melalui analisis terhadap kondisi eksisting, capaian kinerja, serta dinamika sosial-ekonomi dan lingkungan. Isu-isu tersebut menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan yang tercantum dalam dokumen perencanaan strategis perangkat daerah.

Tabel 2.11

Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik	Lemahnya pemahaman aparaturnya desa terhadap tata kelola pemerintahan desa/kelurahan	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia				perlunya peningkatan kualitas SDM di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan
	Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM di Kecamatan					

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
	belum tepenuhinya sarana dan prasarana yang menunjang kinerja kecamatan				Kemiskinan perdesaan	Belum optimalnya Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik
	Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik.		Kemiskinan dan Stunting			
	Belum ada sistem informasi yang terintegrasi pada tingkat kecamatan ke desa					
	Kurangnya pembinaan Desa terhadap Badan Usaha dan Lembaga Pemberdayaan Desa/kelurahan sehingga kurang berkembang dan tidak dapat berjalan sebagaimana fungsinya		Kemiskinan dan Stunting	Kurang berkembangnya BUMDesa dan BUMDesma	Kemiskinan perdesaan	Peran BUMDesa, BUMDesma, Lembaga dan pemberdayaan desa/kelurahan belum optimal dalam pembangunan desa
					1. Penguatan wawasan kebangsaan 2. Berkembangnya intoleransi	Penguatan wawasan kebangsaan

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra PD Tahun 2025-2029

Dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi Kepala Daerah serta mendayagunakan peran kecamatan sebagai perangkat daerah yang menjalankan kewenangan pelimpahan urusan pemerintahan, Kecamatan Mojoagung menetapkan tujuan strategis yang mengarahkan seluruh program dan kegiatan selama periode perencanaan tahun 2025–2029. Tujuan ini mendukung secara langsung salah satu sasaran pembangunan daerah, yaitu: **“Tersedianya kebijakan dan pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif.”** Tujuan strategis tersebut disusun dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Jombang sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2025–2029, serta mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik kewilayahan Kecamatan Mojoagung. Tujuan ini menjadi fondasi dalam penguatan pelayanan publik, peningkatan tata kelola pemerintahan, serta pemberdayaan masyarakat desa secara berkelanjutan.

Upaya tersebut diarahkan untuk membangun pelayanan publik yang cepat, efisien, serta inklusif, khususnya bagi masyarakat desa dan kelompok rentan yang tersebar di wilayah Kecamatan Mojoagung. Pelayanan yang berkualitas memerlukan penguatan kapasitas aparatur, prosedur pelayanan yang baku dan terstandar, serta pengelolaan layanan yang terintegrasi dengan kebutuhan masyarakat.

Sejalan dengan itu, tujuan utama yang ingin dicapai Kecamatan Mojoagung adalah: **“Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan di tingkat kecamatan”**. Tujuan

ini menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam penyelenggaraan layanan, yang tidak hanya menjadi tanggung jawab kecamatan semata, melainkan memerlukan sinergi aktif dari pemerintah desa, unsur Forkopimcam, organisasi kemasyarakatan, dan perangkat daerah teknis lainnya. Kolaborasi ini mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan kegiatan pelayanan, penanganan isu-isu strategis kewilayahan, hingga pembinaan terhadap perangkat desa. Pengukuran capaian tujuan tersebut dengan **“Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan”**. IKK Kecamatan dijadikan sebagai tolok ukur dalam menilai kualitas kinerja kecamatan yang terdiri dari berbagai aspek mulai dari Aspek Tata Kelola Pelaksanaan Program dan Kegiatan, Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan, Pelaksanaan Tugas Delegatif, Penyelenggaraan Tugas Atributif, Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum dan Pelaksanaan Tugas Lainnya.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Kecamatan Mojoagung mengacu pada ketentuan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penerapan NSPK menjadi pilar penting dalam menjamin mutu, konsistensi, dan akuntabilitas layanan publik di tingkat kecamatan, serta memastikan bahwa kewenangan yang dilimpahkan dapat dijalankan sesuai standar nasional yang terukur.

Melalui penerapan NSPK dan penguatan kolaborasi, Kecamatan Mojoagung berkomitmen untuk memperkuat peran kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan pemerintahan kepada masyarakat. Ke depan, Mojoagung diarahkan untuk membangun model pelayanan yang responsif, digital, terbuka terhadap partisipasi publik, dan sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan demikian,

pelayanan publik yang adaptif dan berkelanjutan dapat diwujudkan sebagai wujud nyata kehadiran negara di tengah masyarakat.

3.2 Sasaran Renstra PD tahun 2025-2029

Sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan di tingkat wilayah, Kecamatan Mojoagung turut mengambil peran penting dalam mendukung arah pembangunan Kabupaten Jombang sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025–2029. Dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati, Kecamatan Mojoagung merumuskan rencana pembangunan lima tahunan yang disusun secara terarah dan sesuai dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat di wilayahnya.

Tujuan utama yang hendak dicapai dalam periode tersebut adalah **“1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik, 2. Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif”** Tujuan ini menjadi landasan dalam mewujudkan pelayanan yang tidak hanya cepat dan tepat, tetapi juga mudah dijangkau oleh seluruh warga, termasuk mereka yang berada di desa-desa dan kelompok masyarakat yang rentan. Pelayanan yang baik juga mencerminkan sejauh mana kecamatan mampu menjalankan perannya dalam mengelola administrasi pemerintahan, mendampingi pembangunan desa, dan merespon permasalahan wilayah dengan sigap.

Namun demikian, pelayanan publik yang berkualitas tidak bisa dilakukan sendirian. Diperlukan kerja sama dan keterlibatan banyak pihak, mulai dari pemerintah desa, unsur Forkopimcam, lembaga masyarakat, hingga perangkat daerah di tingkat kabupaten. Sinergitas ini dimaksudkan sebagai bentuk kerja bersama yang terkoordinasi dalam menyelenggarakan

pemerintahan umum, memberikan layanan administratif, memfasilitasi pembangunan, dan memberdayakan masyarakat.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Kecamatan Mojoagung telah menetapkan dua sasaran strategis, yaitu:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Sasaran ini bertujuan untuk memperkuat posisi kecamatan sebagai pusat koordinasi yang mampu menyatukan berbagai kepentingan dan program dari berbagai pihak. Pelaksanaannya dapat berupa kegiatan seperti: mendampingi desa dalam penyusunan perencanaan, melakukan pembinaan kelembagaan, mengorganisasi forum musyawarah pembangunan, dan membantu menyelesaikan persoalan antarwilayah.

Dengan sinergi yang kuat, kecamatan akan lebih mudah membangun pemerintahan yang efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

2. Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif.

Sasaran ini difokuskan pada upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan di lingkungan kecamatan, mulai dari penyusunan program, pengelolaan anggaran, hingga pelaporan dan evaluasi. Akuntabilitas menjadi kunci, agar setiap kegiatan dapat dipertanggungjawabkan dan benar-benar memberikan manfaat. Di sisi lain, peningkatan kapasitas pegawai juga menjadi perhatian penting agar mereka bisa bekerja dengan profesional dan memberikan pelayanan yang maksimal.

Dalam pelaksanaan dua sasaran tersebut, Kecamatan Mojoagung tetap berpedoman pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Dengan berpegang pada pedoman ini, kecamatan dapat memastikan bahwa seluruh layanan yang diberikan sesuai dengan aturan, terukur dengan jelas, dan bisa diaudit secara transparan

Melalui tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan ini, Kecamatan Mojoagung diharapkan mampu meningkatkan perannya sebagai penggerak utama pelayanan publik dan penghubung koordinasi antar wilayah, dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang lebih efektif, terbuka, dan berfokus pada pelayanan yang memberi dampak nyata bagi masyarakat.

Tabel 3.1 Tehnik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

VISI : MEWUJUDKAN JOMBANG MAJU DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA										
MISI : MENGHADIRKAN TRANSFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG TERBUKA DAN KOLABORATIF										
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Tersedianya kebijakan dan pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat kecamatan		Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan	75	75,3	75,8	76	76,5	76,8	
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Mojoagung	8,35	8,38	8,41	8,46	8,48	8,5	
		Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	72,8	73	73,3	73,6	73,9	74,2	

3.3 Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, strategi pembangunan Kecamatan Mojoagung pada periode tahun 2025–2029 disusun untuk memastikan keterpaduan antara arah kebijakan daerah dengan pelaksanaan program di tingkat wilayah. Strategi ini juga disesuaikan dengan kondisi aktual kewilayahan, perkembangan teknologi, tuntutan pelayanan publik, serta kebutuhan masyarakat yang semakin beragam.

Strategi Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mojoagung Tahun 2025–2029 merupakan panduan menyeluruh dalam merancang langkah-langkah konkret untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan lima tahunan. Strategi ini berisi upaya-upaya sistematis yang mencakup penguatan sumber daya, penentuan arah program dan kegiatan, serta tahapan implementasi yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan strategis yang terus berkembang.

Dalam konteks arah pembangunan jangka menengah Kabupaten Jombang Tahun 2026–2030, strategi Kecamatan Mojoagung diarahkan pada *Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Kolaboratif*. Fokus ini menjadi landasan utama dalam menjawab kebutuhan masyarakat yang dinamis serta memperkuat peran kecamatan sebagai simpul koordinasi pelayanan dan pemerintahan di tingkat wilayah.

Strategi pembangunan lima tahunan difokuskan pada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang inklusif, kolaboratif, serta berbasis kinerja. Pelaksanaan strategi tersebut dilakukan melalui pendekatan penguatan kelembagaan, optimalisasi sumber daya, serta penerapan sistem manajemen pelayanan yang efektif dan akuntabel.

Guna menjamin strategi dapat diimplementasikan secara efektif serta tujuan dan sasaran Renstra dapat dicapai secara bertahap, telah dirancang tahapan pembangunan tahunan selama periode 2025–2029. Tahapan ini menjadi acuan untuk menetapkan fokus prioritas pembangunan setiap tahun, yang mencakup peningkatan kualitas pelayanan, penguatan struktur dan kapasitas kelembagaan, serta kontribusi terhadap kebijakan strategis daerah.

Rangkaian tahapan tersebut disusun secara sistematis dan bertingkat, dimulai dari penguatan internal kelembagaan dan sistem kerja, dilanjutkan dengan perluasan cakupan kegiatan serta peningkatan peran kecamatan dalam mengintegrasikan program lintas sektor di wilayah. Melalui pendekatan ini, perangkat daerah diharapkan mampu menyusun capaian tahunan yang realistis, terukur, dan selaras dengan arah pembangunan daerah.

Penjabaran tahapan pembangunan tahunan sebagai dasar perencanaan bertahap menuju tercapainya sasaran strategis perangkat daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Pentahapan Renstra PD

TAHAP I 2026	TAHAP II 2027	TAHAP III 2028	TAHAP IV 2029	TAHAP V 2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<p>Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penguatan sarana prasarana dan sistem pelayanan administratif.</p> <p>Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan. Penataan ruang pelayanan yang nyaman, penyediaan sarana digital, serta optimalisasi layanan PATEN menjadi langkah awal yang strategis dalam memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sistem pengaduan publik juga diperkuat untuk memastikan transparansi dan</p>	<p>Penguatan kapasitas dan peran kelembagaan masyarakat desa peningkatan kualitas partisipasi warga dalam proses perencanaan pembanguna secara partisipatif.</p> <p>Penguatan partisipasi dan kapasitas masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Kecamatan berperan aktif dalam memfasilitasi kegiatan pemberdayaan yang melibatkan organisasi masyarakat seperti PKK, karang taruna, RT/RW, serta posyandu. Selain itu, peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didorong untuk menjadi instrumen ekonomi lokal yang</p>	<p>Penguatan ketenteraman dan ketertiban wilayah melalui optimalisasi peran dan koordinasi lintas sektor dan penanganan gangguan keamanan.</p> <p>Menjaga stabilitas dan kondusivitas lingkungan kewilayahan dengan memperkuat peran dan sinergi antarinstitusi yang tergabung dalam struktur pemerintahan kewilayahan, seperti unsur kepolisian, TNI, dan instansi teknis lainnya. Sistem deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban ditingkatkan</p>	<p>Optimalisasi tata kelola urusan pemerintahan umum yang terkoordinasi melalui penguatan peran Forkopimcam dan penguatan integritas sosial masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan umum di tingkat kecamatan menuntut koordinasi lintas sektor yang kuat dan responsif, terutama dalam merespons isu-isu sosial, menjaga netralitas penyelenggara pemerintahan, dan menumbuhkan ketahanan sosial masyarakat. Sinergi antarinstitusi seperti kecamatan, kepolisian sektor, koramil, dan unsur keagamaan untuk menyatukan langkah kebijakan di wilayah. Selain penguatan koordinatif, strategi ini juga</p>	<p>Penguatan pembinaan dan pengawasan tata kelola pemerintahan desa</p> <p>Optimalisasi fungsi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Evaluasi menyeluruh terhadap capaian pembinaan dilakukan sebagai dasar rekomendasi kebijakan penguatan tata kelola desa. Kecamatan berperan sebagai fasilitator utama yang memastikan administrasi dan pengelolaan keuangan desa berjalan akuntabel dan transparan.</p>

responsivitas layanan.	mendukung kemandirian desa. Peningkatan kualitas pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) desa dan kecamatan juga menjadi fokus, sebagai upaya mendorong perencanaan yang inklusif, berbasis kebutuhan masyarakat, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah.	melalui penguatan mekanisme komunikasi internal serta pelaksanaan forum koordinasi yang terjadwal dan responsif terhadap dinamika sosial.	mencakup pembinaan wawasan kebangsaan melalui berbagai kegiatan edukatif dan dialog kebangsaan bersama tokoh masyarakat, pelajar, pemuda, dan organisasi sosial.	
------------------------	--	---	--	--

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.

Arah kebijakan Perangkat Daerah merupakan rangkaian langkah operasional yang menjadi implementasi teknis dari Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), yang diselaraskan dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Kebijakan ini juga diintegrasikan dengan arah pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2025–2029, serta dijabarkan secara konsisten dalam strategi dan program kerja yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra.

Sebagai unit kerja yang menjalankan sebagian urusan pemerintahan umum berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Bupati, Kecamatan memiliki peran penting dalam mengimplementasikan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK). Penerapan NSPK di Kecamatan Mojoagung dilakukan dengan menyesuaikan berbagai aspek teknis dan prosedural

dalam penyelenggaraan layanan kepada masyarakat. Penyesuaian ini meliputi antara lain: penetapan standar waktu layanan administrasi, penyusunan SOP pelayanan yang sejalan dengan kebijakan pusat, pengelolaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) sesuai jenis layanan wajib, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pelayanan secara transparan dan partisipatif.

Semua elemen teknis tersebut mengacu pada pedoman dan regulasi yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri, kementerian sektoral terkait, dan Kementerian PAN-RB, guna memastikan keseragaman kualitas dan kepatuhan terhadap kebijakan nasional.

Dalam tataran kebijakan daerah, pelaksanaan NSPK ini juga sejalan dengan arah pembangunan sebagaimana dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2025–2029, khususnya pada kebijakan yang mengarah pada perbaikan struktur dan tata kelola pelayanan publik agar lebih responsif, berkualitas, dan mudah diakses masyarakat. Strategi pelaksanaannya difokuskan pada penguatan koordinasi lintas sektor di wilayah kecamatan, peningkatan sinergi internal antar-subunit kerja, serta pengembangan kolaborasi dengan pemerintah desa dan instansi vertikal guna menciptakan sistem layanan yang lebih terpadu dan efektif.

Dengan kata lain, arah kebijakan berfungsi sebagai penghubung antara kerangka regulasi nasional, visi daerah, dan konteks operasional di tingkat perangkat daerah. Setiap kebijakan yang ditetapkan bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pembangunan tetap fokus, terukur, dan mampu menjawab kebutuhan strategis kewilayahan sesuai dengan peran dan kontribusi masing-masing perangkat daerah dalam mendukung pembangunan daerah yang efektif dan berkelanjutan.

Tabel 3.3 Tehnik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

No	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<p>Penyesuaian pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan publik Kecamatan dengan NSPK yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, seperti standar waktu pelayanan, alur SOP pelayanan, jenis layanan PATEN, dan prosedur pelibatan masyarakat</p>	<p>Restrukturisasi kebijakan daerah yang difokuskan untuk meningkatkan dampak positif pelaksanaan program perangkat daerah dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah.</p>	<p>Penguatan sinergi antarunit internal kecamatan dan kolaborasi lintas sektor di tingkat kewilayahan melalui forum koordinasi, integrasi pelayanan berbasis digital dengan Langkah konkret berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana layanan yang representatif dan ramah masyarakat, termasuk ruang pelayanan, peralatan digital, serta fasilitas pendukung. 2. Mengembangkan dan mengintegrasikan sistem pengaduan masyarakat yang cepat ditindaklanjuti, mudah diakses, serta mencerminkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan. 3. Meningkatkan peran kecamatan dalam memfasilitasi program pemberdayaan berbasis potensi lokal dan prioritas pembangunan desa. 4. Memperkuat sinergitas antara kecamatan dan pemerintah desa dalam menyusun dan mengawal dokumen perencanaan partisipatif (RPJMDes, RKPDes, dan APBDes). 	

			<p>5. Membangun mekanisme deteksi dini dan respons cepat terhadap potensi konflik sosial, bencana, atau gangguan ketenteraman.</p> <p>6. Meningkatkan efektivitas koordinasi dan kolaborasi lintas sektor melalui penguatan peran Forkopimcam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di tingkat kecamatan.</p> <p>7. Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan, persatuan dan kesatuan, serta nilai-nilai Pancasila melalui kegiatan edukatif dan pelibatan masyarakat, terutama pemuda, tokoh masyarakat, dan lembaga desa.</p> <p>8. Meningkatkan intensitas pembinaan dan asistensi kecamatan terhadap penyusunan dokumen tata kelola pemerintahan desa.</p>	
--	--	--	--	--

Tabel 3.5

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : MEWUJUDKAN JOMBANG MAJU DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA			
Misi : Menghadirkan transformasi tata kelola pemerintahan yang terbuka dan kolaboratif			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat kecamatan	1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penguatan sarana prasarana dan sistem pelayanan administratif.	1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana layanan yang representatif dan ramah masyarakat, termasuk ruang pelayanan, peralatan digital, serta fasilitas pendukung.
			2. Mengembangkan dan mengintegrasikan sistem pengaduan masyarakat yang cepat ditindaklanjuti, mudah diakses, serta mencerminkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan
		2. Penguatan kapasitas dan peran kelembagaan masyarakat desa peningkatan kualitas partisipasi warga dalam proses perencanaan pembangunan secara partisipatif.	1. Meningkatkan peran kecamatan dalam memfasilitasi program pemberdayaan berbasis potensi lokal dan prioritas pembangunan desa.
			2. Memperkuat sinergitas antara kecamatan dan pemerintah desa dalam menyusun dan mengawal dokumen perencanaan partisipatif (RPJMDes, RKPDes, dan APBDes).
			3. Meningkatkan peran kecamatan dalam memfasilitasi program pemberdayaan berbasis potensi lokal dan prioritas pembangunan desa.
		3. Penguatan ketenteraman dan ketertiban wilayah melalui optimalisasi peran dan	1. Membangun mekanisme deteksi dini dan respons cepat terhadap potensi konflik sosial, bencana, atau gangguan ketenteraman.

		koordinasi lintas sektor dan penanganan gangguan keamanan.	2. Meningkatkan efektivitas koordinasi dan kolaborasi lintas sektor melalui penguatan peran Forkopimcam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di tingkat kecamatan
		4. Penguatan pembinaan dan pengawasan tata Kelola pemerintahan desa	1. Meningkatkan intensitas pembinaan dan asistensi kecamatan terhadap penyusunan dokumen tata kelola pemerintahan desa.
	2. Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	1. Peningkatan Pemahaman ASN tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB)	1. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan instansi terkait bimbingan, sosialisasi, atau internalisasi rutin Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi
			2. Penggunaan teknologi informasi untuk mempermudah pelaporan, monitoring, evaluasi sekaligus analisis capaian kinerja ASN
		2. Memperkuat Budaya Akuntabilitas di Lingkungan Kecamatan termasuk penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi kerja	1. Meningkatkan kualitas regulasi internal terkait reward and punishment yang mendorong penerapan budaya kerja berbasis akuntabilitas dan hasil kerja nyata

BAB IV

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN

Peran Kecamatan sebagai garda terdepan dalam pemerintahan wilayah menuntut adanya peningkatan mutu layanan publik, seiring dengan meningkatnya harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan di berbagai bidang kehidupan, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan. Untuk menjawab tuntutan ini, diperlukan transformasi manajemen sektor publik melalui berbagai langkah reformasi, seperti penataan ulang proses kerja (reengineering), revitalisasi kelembagaan, dan restrukturisasi birokrasi menuju organisasi yang lebih modern dan profesional.

Transformasi tersebut mencakup upaya perancangan ulang struktur dan proses birokrasi agar mampu merespons dinamika secara cepat dan tepat. Organisasi pemerintah perlu diarahkan menjadi lebih proaktif, responsif, serta adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, termasuk dalam menghadapi kompleksitas permasalahan masyarakat di tingkat lokal.

Dalam konteks ini, pengelolaan pelayanan publik harus diarahkan untuk menghilangkan hambatan-hambatan struktural dan kultural, termasuk pada pola prosedur dan perilaku aparatur yang belum mendukung perbaikan mutu layanan. Inovasi pelayanan yang dikembangkan harus mencakup layanan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat luas, baik dalam bentuk pelayanan administratif, maupun layanan teknis yang berdampak terhadap kesejahteraan warga.

Selain itu, dukungan terhadap layanan publik juga melibatkan kebijakan teknis operasional, pengalokasian sumber daya organisasi (seperti sarana-prasarana), serta penguatan aspek manajerial dalam hal pengelolaan SDM dan keuangan. Seluruh kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat, serta

membentuk citra birokrasi kecamatan yang kredibel dan berorientasi pada pelayanan. Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan strategis tersebut, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk program.

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka program dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan, didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Program-program yang tercantum dalam Rencana Strategis ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Kecamatan Mojoagung pada periode Tahun 2025-2029.

Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik lainnya, sehingga rencana strategis oleh manajemen puncak beserta stakeholder secara berkala untuk mengetahui status capaian kinerja, dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Rencana strategis merupakan bentuk kajian penting dan merupakan substansi yang diperlukan dalam analisis akuntabilitas kinerja SKPD, semakin sering manajemen puncak melakukan pemantauan capaian kinerja yang diperjanjikan, maka semakin banyak

pula rekomendasi yang dihasilkan untuk perbaikan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya.

Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil review Rencana Strategis menunjukkan tingginya komitmen SKPD dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang.

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Mojoagung adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Subkegiatan:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3. Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah

Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Subkegiatan:

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya

Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah

Subkegiatan:

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor.
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Subkegiatan:

1. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Subkegiatan:

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Subkegiatan:

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan.
2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Kegiatan:

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

Subkegiatan:

1. Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
2. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Subkegiatan:

1. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
2. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

4. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan:

Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Subkegiatan:

1. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Kegiatan:

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Subkegiatan:

1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan:

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Subkegiatan:

1. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

Program, kegiatan, dan subkegiatan dalam Rencana Strategis Kecamatan Mojoagung Tahun 2025–2029 dirumuskan melalui proses penjabaran yang sistematis dan terukur dari tujuan, sasaran, serta target kinerja perangkat daerah. Setiap perencanaan yang tersusun mengacu secara langsung pada klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur resmi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri, serta disesuaikan dengan pemutakhiran sistem dan regulasi melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai instrumen integrasi perencanaan dan penganggaran daerah.

Dengan pendekatan tersebut, program dan subkegiatan yang tertuang dalam dokumen ini memiliki dasar legalitas dan teknis yang kuat, serta selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten. Rangkaian program dirancang secara bertahap mulai tahun 2026 hingga 2030, guna memastikan ketercapaian sasaran strategis secara berkelanjutan dan proporsional dari tahun ke tahun.

Tahun 2030 diposisikan sebagai fase penguatan keberlanjutan pembangunan, yang juga menjadi tonggak awal penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2030. Pada fase ini, program dan kegiatan diarahkan untuk menjaga kesinambungan arah pembangunan, menguatkan hasil-hasil yang telah dicapai, dan memastikan transisi kebijakan yang selaras dengan siklus perencanaan berikutnya.

Dengan demikian, Renstra Kecamatan Mojoagung tidak hanya menjadi dokumen lima tahunan, melainkan juga merupakan landasan strategis yang integratif untuk menyatukan arah pembangunan jangka

menengah dan tahunan secara konsisten dan terpadu. Rincian program, kegiatan, dan subkegiatan selanjutnya disajikan pada bagian berikutnya sebagai bagian dari strategi operasional kecamatan dalam mendukung pembangunan daerah.

Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Kecamatan Mojoagung

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
7.01.0.00.0.00.11.0000 - Kecamatan Mojoagung							
- Tersedianya kebijakan dan pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan		
					Indeks Kualitas Pelayanan Publik		
			Meningkatnya kinerja aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Kecamatan Mojoagung		Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Meningkatnya efektifitas pelayanan kepada masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		
				Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	7.01.02.2.02.0002 - Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
Meningkatnya kinerja aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Mojoagung		Capaian Nilai Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
			Meningkatnya kinerja aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Mojoagung		Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Terselenggaranya kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	7.01.05.2.01.0003 - Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	
					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
			Meningkatnya kinerja aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kecamatan Mojoagung		Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset	7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
			Meningkatnya kinerja aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Mojoagung		Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.03.2.01 – Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	7.01.03.2.01 – Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
		Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif			Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		
			Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Mojoagung		Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
				Tersusunnya laporan keuangan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Tersusunnya laporan pengadaan paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Tersusunnya laporan penyediaan barang dan jasa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tersusunnya laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7.01.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersusunnya laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Tersusunnya laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Tabel 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN				3.667.093.401		3.709.733.362		3.661.983.362		3.800.983.362		3.746.483.362		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.384.125.901		3.411.233.362		3.335.983.362		3.448.983.362		3.374.483.362		
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Mojoagung	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	73,48	74,3	3.384.125.901	74,6	3.411.233.362	74,9	3.335.983.362	75,2	3.448.983.362	75,3	3.374.483.362	7.01.0.00.0.00.11.00 - Kecamatan Mojoagung	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				17.069.500		18.750.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5	5	17.069.500	5	18.750.000	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2		2		2		3		2			
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	-	10		10		10		10		10			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9.770.000		10.500.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	9.770.000	2	10.500.000	2	8.000.000	3	8.000.000	2	8.000.000		
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6.299.500		7.250.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5	5	6.299.500	5	7.250.000	5	1.500.000	5	1.500.000	5	1.500.000		
7.01.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				1.000.000		1.000.000		500.000		500.000		500.000		
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	-	10	1.000.000	10	1.000.000	10	500.000	10	500.000	10	500.000		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.719.681.362		2.722.283.362		2.723.583.362		2.725.083.362		2.728.083.362		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersusunnya laporan keuangan perangkat daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	2.719.681.362	1	2.722.283.362	1	2.723.583.362	1	2.725.083.362	1	2.728.083.362		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	17	17		17		17		17		17			
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2.637.083.362		2.637.083.362		2.637.083.362		2.637.083.362		2.637.083.362		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	17	17	2.637.083.362	17	2.637.083.362	17	2.637.083.362	17	2.637.083.362	17	2.637.083.362		
7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				82.398.000		84.000.000		85.000.000		86.000.000		87.000.000		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	82.398.000	12	84.000.000	12	85.000.000	12	86.000.000	12	87.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				200.000		1.200.000		1.500.000		2.000.000		4.000.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	200.000	1	1.200.000	1	1.500.000	1	2.000.000	1	4.000.000		
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian				20.900.000		22.000.000		24.000.000		25.000.000		26.000.000		
Tersusunnya laporan pengadaan paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2	34	20.900.000	34	22.000.000	34	24.000.000	34	25.000.000	34	26.000.000		
7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				20.900.000		22.000.000		24.000.000		25.000.000		26.000.000		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2	34	20.900.000	34	22.000.000	34	24.000.000	34	25.000.000	34	26.000.000		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				163.524.500		174.700.000		181.400.000		186.900.000		193.400.000		
Tersusunnya laporan penyediaan barang dan jasa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2	163.524.500	2	174.700.000	2	181.400.000	2	186.900.000	2	193.400.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	33	30		32		34		34		35			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	5		5		5		5		5			
7.01.01.2.06.0001 – Penyediaan Komponen Instalasi				2.038.400		3.000.000		4.000.000		5.500.000		6.000.000		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	5	2.038.400	5	3.000.000	5	4.000.000	5	5.500.000	5	6.000.000		
7.01.01.2.06.0002 – Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				19.685.100		22.000.000		23.000.000		24.000.000		25.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	33	30	19.685.100	32	22.000.000	34	23.000.000	34	24.000.000	35	25.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				100.947.000		105.000.000		108.000.000		109.000.000		110.000.000		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	100.947.000	1	105.000.000	1	108.000.000	1	109.000.000	1	110.000.000		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				7.032.000		8.300.000		9.000.000		10.000.000		12.000.000		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2	7.032.000	2	8.300.000	2	9.000.000	2	10.000.000	2	12.000.000		
7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				2.352.000		2.400.000		2.400.000		2.400.000		2.400.000		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	1	1	2.352.000	1	2.400.000	1	2.400.000	1	2.400.000	1	2.400.000		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				31.470.000		34.000.000		35.000.000		36.000.000		38.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4	4	31.470.000	4	34.000.000	4	35.000.000	4	36.000.000	4	38.000.000		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				94.538.139		50.000.000		60.000.000		65.000.000		70.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersusunnya laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	35	25	94.538.139	30	50.000.000	35	60.000.000	25	65.000.000	20	70.000.000		
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	0		0		0		0		0			
7.01.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		0		0		
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				94.538.139		50.000.000		60.000.000		65.000.000		70.000.000		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	35	25	94.538.139	30	50.000.000	35	60.000.000	25	65.000.000	20	70.000.000		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				118.760.000		122.000.000		124.000.000		126.000.000		129.000.000		
Tersusunnya laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	25	25	118.760.000	25	122.000.000	25	124.000.000	25	126.000.000	25	129.000.000		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	24	12		12		12		12		12			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				42.480.000		44.000.000		45.000.000		46.000.000		47.000.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	24	12	42.480.000	12	44.000.000	12	45.000.000	12	46.000.000	12	47.000.000		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				76.280.000		78.000.000		79.000.000		80.000.000		82.000.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	25	25	76.280.000	25	78.000.000	25	79.000.000	25	80.000.000	25	82.000.000		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				249.652.400		301.500.000		213.000.000		311.000.000		218.000.000		
Tersusunnya laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	5	249.652.400	5	301.500.000	5	213.000.000	5	311.000.000	5	218.000.000		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	22	25		25		26		28		30			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	13	13		13		13		13		13			
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan				52.950.000		55.000.000		56.000.000		58.000.000		59.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	13	13	52.950.000	13	55.000.000	13	56.000.000	13	58.000.000	13	59.000.000		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				170.882.400		220.000.000		130.000.000		225.000.000		130.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	5	170.882.400	5	220.000.000	5	130.000.000	5	225.000.000	5	130.000.000		
7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				25.820.000		26.500.000		27.000.000		28.000.000		29.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	22	25	25.820.000	25	26.500.000	26	27.000.000	28	28.000.000	30	29.000.000		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				12.217.700		13.000.000		15.000.000		17.000.000		20.000.000		
Meningkatnya kinerja aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Kecamatan Mojoagung	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	-	76,5	12.217.700	77	13.000.000	77,5	15.000.000	78	17.000.000	78,5	20.000.000	7.01.0.00.0.00.11.0000 – Kecamatan Mojoagung	
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				12.217.700		13.000.000		15.000.000		17.000.000		20.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya efektifitas pelayanan kepada masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12	12.217.700	12	13.000.000	12	15.000.000	12	17.000.000	12	20.000.000		
	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah	-	4		4		4		4		4			
7.01.02.2.02.0002 - Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				4.500.000		5.000.000		6.000.000		7.000.000		8.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	-	4	4.500.000	4	5.000.000	4	6.000.000	4	7.000.000	4	8.000.000		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				7.717.700		8.000.000		9.000.000		10.000.000		12.000.000		
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12	7.717.700	12	8.000.000	12	9.000.000	12	10.000.000	12	12.000.000		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				96.708.600		100.500.000		109.000.000		120.000.000		131.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kinerja aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Mojoagung	Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	-	75,5	96.708.600	76	100.500.000	76,5	109.000.000	77	120.000.000	77,5	131.000.000	7.01.0.00.0.00 .11.0000 – Kecamatan Mojoagung	
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				96.708.600		100.500.000		109.000.000		120.000.000		131.000.000		
Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	108	108	96.708.600	108	100.500.000	108	109.000.000	108	120.000.000	108	131.000.000		
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di	4	4		4		4		4		4			
7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				17.728.400		18.500.000		19.000.000		20.000.000		21.000.000		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	108	108	17.728.400	108	18.500.000	108	19.000.000	108	20.000.000	108	21.000.000		
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan				78.980.200		82.000.000		90.000.000		100.000.000		110.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4	4	78.980.200	4	82.000.000	4	90.000.000	4	100.000.000	4	110.000.000		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				9.015.000		10.000.000		11.000.000		12.000.000		13.000.000		
Meningkatnya kinerja aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Mojoagung	Capaian Nilai Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	-	49,5	9.015.000	50	10.000.000	50,5	11.000.000	51	12.000.000	51,5	13.000.000	7.01.0.00.0.00 .11.0000 – Kecamatan Mojoagung	
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Pengakuan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				9.015.000		10.000.000		11.000.000		12.000.000		13.000.000		
Terlaksananya koordinasi Penerapan dan Pengakuan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	12	12	9.015.000	12	10.000.000	12	11.000.000	12	12.000.000	12	13.000.000		
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				9.015.000		10.000.000		11.000.000		12.000.000		13.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	12	12	9.015.000	12	10.000.000	12	11.000.000	12	12.000.000	12	13.000.000		
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				156.367.500		165.000.000		178.000.000		189.000.000		192.000.000		
Meningkatnya kinerja aspek penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Mojoagung	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	-	75,5	156.367.500	76	165.000.000	76,5	178.000.000	77	189.000.000	77,5	192.000.000	7.01.0.00.0.00 .11.0000 – Kecamatan Mojoagung	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				156.367.500		165.000.000		178.000.000		189.000.000		192.000.000		
Terselenggaranya kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	4	4	156.367.500	4	165.000.000	4	178.000.000	4	189.000.000	4	192.000.000		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	100	150		150		150		150		150			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.05.2.01.0003 – Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				103.510.500		110.000.000		120.000.000		130.000.000		132.000.000		
Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	100	150	103.510.500	150	110.000.000	150	120.000.000	150	130.000.000	150	132.000.000		
7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				52.857.000		55.000.000		58.000.000		59.000.000		60.000.000		
Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	4	4	52.857.000	4	55.000.000	4	58.000.000	4	59.000.000	4	60.000.000		
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				8.658.700		10.000.000		13.000.000		14.000.000		16.000.000		
Meningkatnya kinerja aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kecamatan Mojoagung	Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	-	75,5	8.658.700	76	10.000.000	76,5	13.000.000	77	14.000.000	77,5	16.000.000	7.01.0.00.0.00 .11.00 00 – Kecamatan Mojoagung	
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				8.658.700		10.000.000		13.000.000		14.000.000		16.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	36	36	8.658.700	36	10.000.000	36	13.000.000	36	14.000.000	36	16.000.000		
7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				8.658.700		10.000.000		13.000.000		14.000.000		16.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	36	36	8.658.700	36	10.000.000	36	13.000.000	36	14.000.000	36	16.000.000		

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah sebagai berikut:

Tabel 4.4

Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah Rancangan Akhir Renstra
Pemerintah Kabupaten Jombang

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1.	NIHIL			

Program di Kecamatan mendukung pembangunan daerah dan sebagai fungsi pengkoordinasian namun program tersebut belum intervensi secara langsung pada prioritas pembangunan daerah.

Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 ditentukan melalui serangkaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang berlaku mulai tahun 2025 hingga 2030. Indikator ini berperan sebagai instrumen pengukuran yang secara langsung mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam periode perencanaan jangka menengah. IKU juga merupakan bentuk konkret komitmen perangkat daerah dalam mendukung capaian prioritas pembangunan sebagaimana telah diatur dalam dokumen RPJMD Kabupaten Jombang.

Setiap indikator kinerja yang digunakan telah dirumuskan dengan mempertimbangkan prinsip relevansi, keterukuran, dan akuntabilitas, serta diturunkan dari hubungan logis antara rumusan tujuan dan sasaran Renstra dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Dengan demikian, IKU dirancang agar mampu memberikan gambaran yang objektif mengenai kinerja perangkat daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil.

Secara keseluruhan, Indikator Kinerja Utama ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari strategi pencapaian target pembangunan, dan menjadi sarana pengendalian serta evaluasi capaian kinerja secara berkala. IKU yang mendukung ketercapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD disajikan dalam bagian berikut:

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mojoagung

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan	75	75.3	75.8	76	76.5	76.8	
		1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1. Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP)	8.35	8.38	8.41	8.46	8.48	8.5	
		2. Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	2. Indeks Reformasi Birokrasi Perangka t Daerah	72.8	73	73.3	73.6	73.9	74.2	

Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) berlaku dari tahun 2025 hingga Tahun 2030 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan	Indeks	75	75,3	75,8	76	76,5	76,8	Indikator Sasaran RPJMD dengan PD Penanggung Jawab Utama: Dispendukcapil; Kecamatan, Bagian Tata Pemerintahan, Bappeda, Inspektorat

BAB V

PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mojoagung Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman arah pembangunan wilayah kecamatan dalam lima tahun ke depan, dengan tetap mengacu pada visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2025–2029. Renstra ini juga menjadi instrumen penting dalam mengarahkan pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan sebagai pelaksana urusan pemerintahan yang dilimpahkan, sekaligus simpul koordinasi pembangunan di tingkat kewilayahan.

Dengan perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan yang logis, terukur, dan selaras dengan kebijakan nasional maupun daerah, Renstra ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelayanan publik, memperkuat sinergitas antar pemangku kepentingan, serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang responsif, partisipatif, dan akuntabel.

Sebagai dokumen yang dinamis, Renstra ini akan terus ditinjau dan disesuaikan dengan perkembangan kondisi strategis, kebijakan pemerintah, serta kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan Renstra juga akan didukung oleh sistem pemantauan dan evaluasi secara periodik untuk memastikan seluruh sasaran yang ditetapkan dapat dicapai dengan optimal dan berkelanjutan.

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Mojoagung Tahun 2025 - 2029 menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 - 2029 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Mojoagung yang menjadi dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Renstra ini. Keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun ke dalam Renstra ini memerlukan partisipasi. Dengan

demikian, Renstra ini tidak hanya sebagai dokumen administrasi saja, namun secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Dan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Kecamatan Mojoagung, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

Akhirnya, dengan komitmen seluruh jajaran Kecamatan Mojoagung dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, pelaksanaan Renstra ini diharapkan mampu membawa manfaat nyata bagi masyarakat serta berkontribusi dalam mewujudkan Kecamatan Mojoagung sebagai wilayah yang maju, tertib, dan berorientasi pelayanan publik.

Jombang, 19 September 2025

Camat Mojoagung



ANJIK EKO SAPUTRO, SH., M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19700727 199203 1 007